

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR : 050/042.g/410 Tahun 2018
TANGGAL : 8 Agustus 2018

**PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2018**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika

Penulisan

1.1 Latar Belakang

Dalam manajemen pembangunan daerah terdapat tiga fase yang harus dilalui untuk mendapatkan dampak yang signifikan secara publik yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pengendalian monitoring evaluasi dan pelaporan. Ketiga tahapan tersebut memiliki bobot dengan proporsi dan kontribusi yang saling berkaitan.

Fungsi perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang harus dijalankan. Secara umum salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan baik itu untuk urusan pemerintah maupun swasta serta untuk skala nasional maupun daerah terletak pada aspek perencanaan yang berkualitas. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang disusun mampu menampung aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah/panjang, apabila telah disusun, serta mendukung pencapaian prioritas tujuan. Tahapan penyusunan perencanaan merupakan tahapan awal pelaksanaan kegiatan atau aktivitas dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Bagian ini merupakan tahapan yang penting dalam fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi - fungsi yang lain dari organisasi tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak diawali dari tahap perencanaan.

Perencanaan pembangunan yang baik akan mendorong hasil capaian pembangunan sebagaimana yang ditargetkan dalam peran pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan. Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional dan terutama bagi daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur dan mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Merujuk pada regulasi teknis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan rencana Pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka Menengah daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD menjadi pijakan formal sebagai pijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) tersebut juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja perangkat daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja perangkat daerah. Penyusunan Rancangan Renja perangkat daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja perangkat daerah yang definitif.

Mengacu seluruh regulasi baik undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Magelang telah menyusun dokumen RPJPD Kota Magelang 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009. Untuk dokumen RPJMD Tahap I (2005-2010) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2005, sedang RPJMD Tahap II (2011-2015) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015. Sementara itu RPJMD Kota Magelang Tahap ke III (Tahun 2016-2021) telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Magelang No 1 Tahun 2016 yang menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra OPD. RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 nantinya akan di turunkan menjadi dokumen perencanaan tahunan tingkat Kota atau yang di sebut dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), di mana RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan Penyusunan Renja OPD yang merupakan pelaksanaan dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2010 yang di perbaharui dengan Permendari 86 Tahun 2017. Penyusunan Renja OPD dilakukan dengan mengacu pada Renstra OPD serta berpedoman kepada RKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja OPD mengacu pada RPJM-D Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 dan Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.11/124/112 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 pada Pemerintah Kota Magelang. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.11/124/112 Tahun 2017. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar penyusunan Renja perangkat daerah. Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2018 juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Bappeda nomor 050/042.g/410 tahun 2018 merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD sampai dengan triwulan II tahun 2018 selanjutnya menjadi dasar perumusan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) SKPD Tahun 2018. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2018 selain mengacu pada hasil evaluasi kinerja triwulan II, juga mengacu pada perkembangan kondisi kebijakan dan keuangan yang ada. Penyesuaian terhadap kebijakan seperti perkembangan peraturan yang mengamanatkan kepada daerah untuk melaksanakan ketentuan aturan tersebut yang belum masuk dalam perencanaan penganggaran pada awal 2018. Penyesuaian kebijakan tidak hanya dari kebijakan daerah saja tetapi juga terkait kebijakan pusat dan provinsi. Dan juga penyesuaian keuangan, seperti adanya SILPA yang didapat setelah adanya evaluasi keuangan dari BPK terkait realisasi anggaran satu tahun sebelumnya.

Disamping itu perubahan renja perangkat daerah 2018 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja pada renja perangkat daerah tahun 2018 sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan

target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Selain beberapa landasan perubahan tersebut, renja perangkat daerah tahun 2018 dapat diubah jika terjadi :

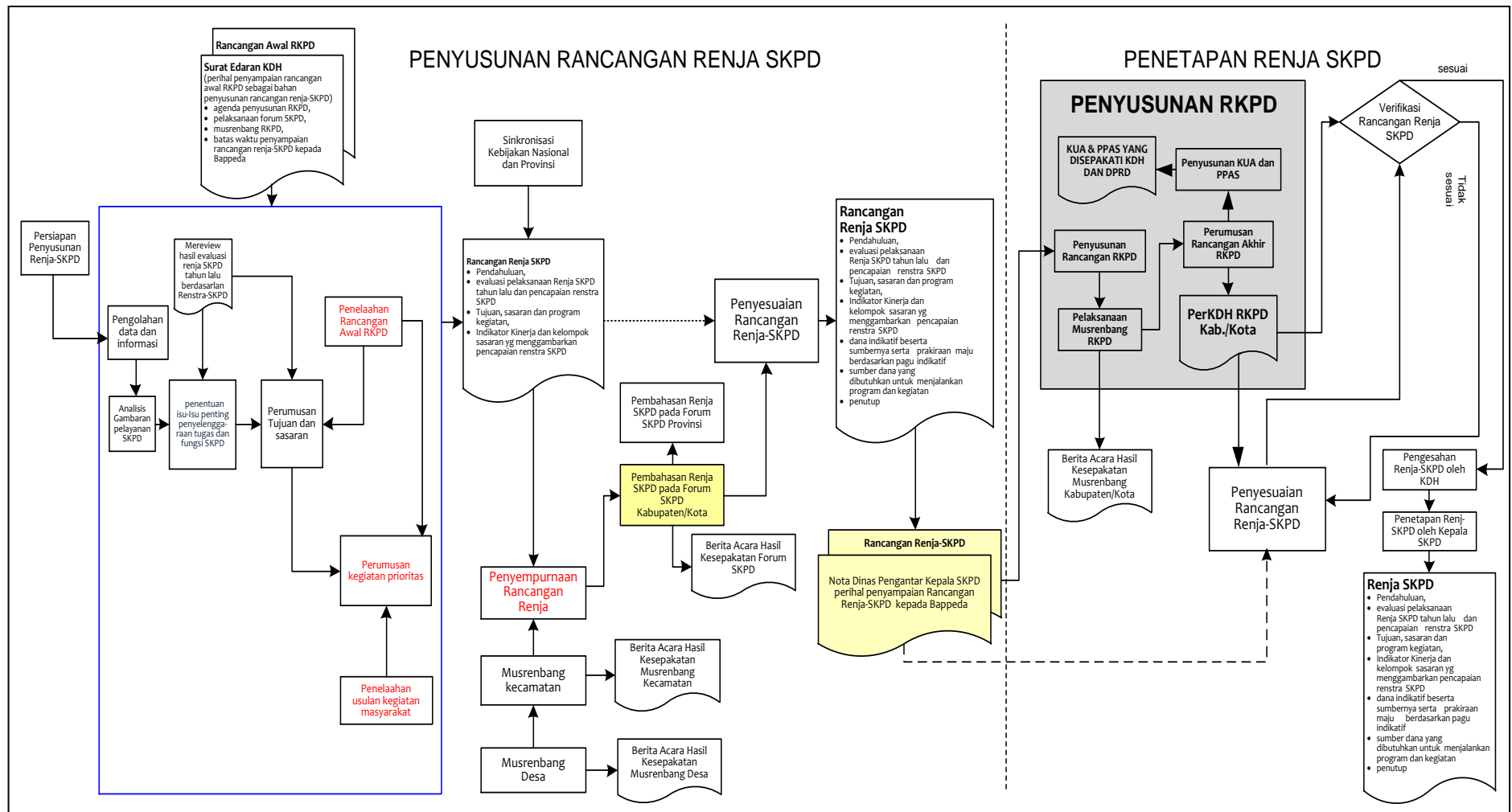
1. Perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah Renstra OPD;
2. Penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah Renstra OPD; dan
3. Terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru yang tidak tercantum pada Renstra OPD, dengan kriteria sebagai berikut:
 - tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 - dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD;
 - adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
 - dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra OPD.

Dengan kata lain perubahan renja perangkat daerah 2018 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Disamping itu dalam penyusunan program/kegiatan juga memperhatikan capaian kinerja SPM yang ada serta pembangunan berperspektif gender yang dilakukan melalui analisis gender.

Penyusunan perubahan renja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018 dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi dasar bagi Rancangan Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2018, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2018. Rancangan perubahan renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada perubahan renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyelarasan akhir dengan Perubahan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota, maka rancangan Perubahan Renja perangkat dapat ditetapkan oleh kepala perangkat daerah setelah ada pengesahan dari walikota.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) OPD Tahun 2018.

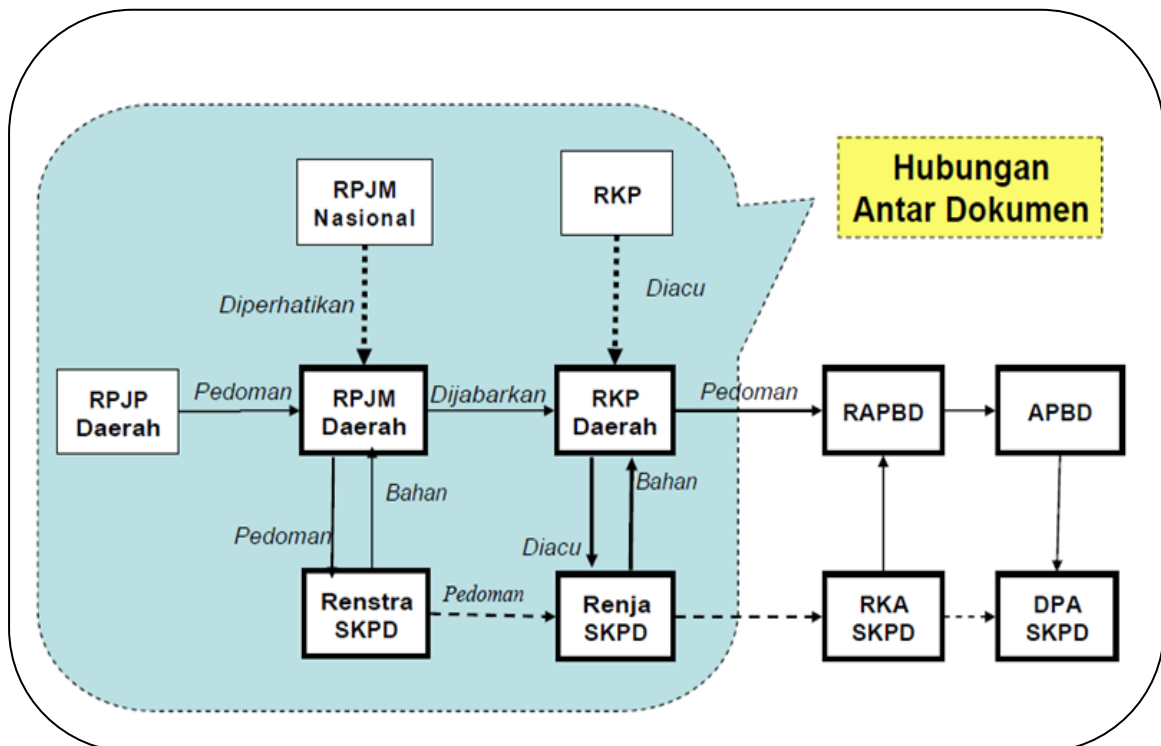
Secara sistematis proses penyusunan Rencana Kerja dapat dijelaskan oleh tabel sebagai berikut :



Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Bappeda Kota Magelang (sesuai Permendagri 86 Tahun 2017)

Dalam penyusunan dokumen Renja OPD digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang), yaitu sebagai berikut:



Sumber : UU No 25 Tahun 2004

Gambar 1-2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021;
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Kota Magelang dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 yang pada akhirnya menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018

2. Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan OPD) Badan untuk menyesuaikan program kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi Triwulan II serta sesuai merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2018 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan yang merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda Kota Magelang dan atau dokumen Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2018.

1.4 Sistematika Renja OPD

Sistematika Perubahan Renja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 050 /112.a/112 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 050/042.g/410 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Perubahan Renja OPD

- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Semester 1 Tahun 2018
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD 2018
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran pada Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 3.3 Rencana Kerja OPD (Renja Perubahan OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
 - 3.4 Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
 - 3.5 Program dan Kegiatan
- BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Bappeda dan Capaian Indikator semester 1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu penting penyelenggaraan Tupoksi

2.4 Review Rancangan RKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dan Capaian Indikator sampai dengan Semester I Tahun 2018

Rencana Kerja (Renja) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Renstra OPD. Renja suatu OPD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif & prakiraan maju. Program dan kegiatan kegiatan yang tercantum di dalam Renja meliputi program dan kegiatan yang sedang berlangsung dan kegiatan alternatif atau baru.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sebagai penjabaran dari perencanaan tahunan dokumen Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja (Renja) OPD memiliki peran yang penting dalam memberikan arah terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) khususnya dalam perubahan Renja Kota Magelang Tahun 2018. Sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010 yang sudah di perbaharui dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, salah satu evaluasi yang harus dilakukan adalah evaluasi hasil pelaksanaan atas rencana Kerja OPD yang telah disusun sebelumnya. Kriteria penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengukuran laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Dalam konsep ini diperlukan indikator input (masukan), output (keluaran), dan outcome (hasil). Berdasarkan pengukuran kinerja dan Evaluasi Kinerja Tahun 2018 maka dapat di simpulkan bahwa capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang pada semester 1 tahun 2018 sebagai berikut:

a. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2018 sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dengan Walikota Magelang yang di ukur dari 5 sasaran strategis. Ke lima sasaran strategis tersebut, 2 kinerja sasaran strategis terdapat di dalam misi pertama RPJMD yaitu sasaran terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel dan sasaran Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan. Adapun kedua sasaran tersebut mempunyai empat indikator kinerja a). Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja; b). Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan; c).Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD, dan d).Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga.

Selain dua sasaran tersebut di atas, kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang di ukur dengan 3 sasaran strategis yang terdapat di dalam Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Magelang Nomor : 050.25/ 007.c /410 TAHUN 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017-2021. Ketiga sasaran tersebut yaitu: a). Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Indikator dari sasaran ini adalah Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif; b). Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Sasaran ini berindikator Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan; c). Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas. Sasaran ini mempunyai indikator kinerja sasaran Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas

b. Penjelasan dari capaian lima sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebagai berikut :

- Capaian untuk sasaran pertama dapat di lihat dari indikator kinerja sasaran yaitu Persentase capaian Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja menunjukkan capaian yang cukup baik. Adapun realisasi kinerja sampai dengan semester 1 tahun 2018 sebesar **43.37 %** dari target

yang ditetapkan di tahun 2018 sebesar **93%**. Walaupun sampai dengan semester 1 capaian indikator ini masih sekitar empat puluhan persen namun pada akhir periode tahun anggaran, target indikator ini optimis akan tercapai. Capaian indikator ini pada akhir tahun 2017 sebesar 90.41% sedangkan tahun 2016 realisasi kinerja indikator sasaran ini mencapai 89% dari target 88 % yang ditetapkan pada tahun 2016 sehingga capaiannya sebesar 101.14%. Capaian kinerja ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 capaian kinerja indikator sasaran ini adalah mencapai 85%, kemudian naik pada tahun 2016 menjadi 89% dari target 88 % yang ditetapkan pada tahun 2016.

- Sementara untuk Indikator kedua pada sasaran pertama yaitu indikator Persentase publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan, Implikasi dari indikator ini melibatkan Profil Daerah (di Bappeda) dan *Data Go* (Dinskominsta). Untuk Profil daerah (SIPD).

Realisasi indikator kinerja Persentase publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan pada tahun semester 1 tahun 2018 sebesar **55%** dari target sebesar 70%. Capaian ini di hitung dari Jumlah dan jenis data yang terpublikasi melalui DataGo Diskominsta dan capaian realisasi untuk jenis data dalam SIPD Kota Magelang. Jenis dan data yang terpublikasi baik melalui DataGo maupun melalui SIPD, dapat dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Capaian realisasi dari indikator ini menunjukkan tren positif.

- Untuk mengukur kinerja dari sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan. Sasaran ini mempunyai 2 (dua) indikator yang yang merepresentasikan keberhasilan dari capaian kerjanya. **Indikator sasaran yang pertama** yaitu Prosentase Usulan Masyarakat yang di akomodir dalam APBD Persentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam APBD mempunyai formulasi perhitungan jumlah usulan masyarakat yang di akomodir di dalam APBD di bagi dengan jumlah usulan masyarakat. Capaian pada semester 1 masih sama dengan angka capaian pada tahun 2017, yaitu sebesar **70.19%** dari target yang di tetapkan di tahun 2018 sebesar **62%**. Adapun perhitungan dari indikator ini baru bisa terhitung secara sempurna pada triwulan ke empat tahun berkenaan.
- Sementara itu untuk indikator kedua dari Sasaran ke dua adalah Cakupan Perangkat Daerah yang Mempunyai Mitra dengan Forum Warga pada tahun 2015 tercapai 44,83% kemudian naik menjadi 55,17% dari target 2016 sebesar 51,72%. Capaian dari indikator ini sebesar 106.67%. Berdasarkan data yang di olah, jumlah OPD yang mempunyai mitra pada tahun 2018 sebanyak 19 OPD dari 29 OPD. Capaian ini apabila di prosentasekan sebesar **65.62%** dari target pada tahun 2018 sebesar 65.52% . Jumlah OPD yang bermitra padah tahun ini lebih banyak apabila di bandingkan

dengan tahun 2017 yaitu sebanyak 17 OPD. Capaian pada tahun 2017 apabila di prosentasekan sebesar 58.62% (jumlah OPD yang ada di Kota Magelang sebanyak 29 OPD).

- Sasaran Strategis yang ke tiga yaitu mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai satu indikator kinerja yang di pergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis yaitu Cakupan kualitas perencanaan partisipatif. Indikator Cakupan kualitas perencanaan partisipatif merupakan indikator komposit dari % usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD ditambah % pokok pokok pikiran DPRD yang yang di akomodir dalam RKPD ditambah % Usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD ditambah % usulan masyarakat di *E- Aspirasi* yang terakomodir dalam Renja PD dibagi 4. Capaian indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif menunjukkan kondisi yang baik. Dari target **57.50%** pada tahun 2018, realisasi indikator kinerja pada semester 1 tahun 2018 sebesar **70.05%**. Indikator ini merupakan indikator komposit dari empat indikator di atas. Capaian sampai dengan semester 1 untuk indikator pembentuknya adalah sebagai berikut: a). Capaian dari indikator persentase usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD sebesar 76%; b) capaian dari indikator persentase pokok pokok pikiran DPRD yang yang di akomodir dalam RKPD sebesar 55.52 %; c). capaian dari indikator persentase Usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD sebesar 68.66 %, dan d). Capaian dari indikator persentase usulan masyarakat di *E- Aspirasi* sebesar 80%. Capaian dari indikator – indikator komposit tersebut menunjukkan semakin berkualitasnya perencanaan yang di susun dengan adanya pelibatan dan partisipasi masyarakat yang meningkat sehingga upaya untuk mengoptimalkan mekanisme merencanakan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- Sasaran strategis yang ke empat adalah “mewujudkan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan”. Indikator yang merepresentasikan sasaran ini adalah Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Indikator kinerja ini di pergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis serta merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Magelang untuk mewujudkan kesinambungan dan integrasi perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Tahunan. Pencapaian dari indikator ini merupakan indikator komposit dari % tingkat keselarasan Renstra PD dengan Renja PD di tambah % tingkat keselarasan RPJMD dengan dengan Renstra PD di tambah Prosentase tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD di bagi 3. Capaian sasaran ini dari target sebesar 100%, pada semester 1 tahun 2018 sudah tercapai sesuai target yaitu **100%**

- sasaran yang ke lima yaitu “ Mewujudkan Dokumen Perencanaan dan Implementasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Fisik Prasarana dan Bidang Sosial Budaya yang Berkualitas” mempunyai satu indikator kinerja yang merepresentasikan sasaran ini adalah Cakupan Ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas. Indikator kinerja ini di pergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis tersebut. Pencapaian dari indikator ini merupakan indikator komposit dari % implementasi perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana di tambah % ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana dibagi 2. Capaian pada semester 1 tahun 2018 untuk indikator Ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas sebesar 73.33. Indikator ini merupakan indikator komposit dari dua indikator di atas. Capaian sampai dengan semester 1 untuk indikator pembentuknya adalah sebagai berikut: a). Indikator tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana capaiannya sebesar 73.44% dan b). Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana yang berkualitas dengan capaiannya sebesar 73.44%. Capaian pada semester 1 masih mempergunakan angka capaian pada tahun 2017 karena perhitungan dari indikator ini baru bisa terhitung secara sempurna pada triwulan ke empat tahun berkenaan.

c. *Terkait dengan capaian sinergisitas sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja* terdapat beberapa kendala yang perlu untuk diantisipasi ke depan antara lain:

1. Masih diperlukannya sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik. Sebagai contoh untuk Pokok pokok pikiran DPRD sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010 ataupun Permendagri 86 Tahun 2017, diamanatkan untuk disampaikan kepada Eksekutif dalam hal ini Bappeda sejak Rancangan Awal RKPD Tahun rencana (Januari), namun demikian selama ini hal tersebut masih bisa belum secara optimal dapat terwujud.
2. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah harus terus dioptimalkan untuk meminimalisasi deviasi.
3. Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Tingkat kapasitas pemahaman terkait proses dan substansi perencanaan di setiap level pada OPD masih belum optimal
4. Masih di perlukannya penguatan data untuk mendukung proses perencanaan, meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan

primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

5. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tinggi, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global. Sehingga membutuhkan solusi dengan pendekatan pemikiran dan langkah yang kreatif dan inovatif.
- d. Untuk mewujudkan pencapaian indikator RPJMD maka dalam Renstra Bappeda telah di rencanakan program – program dan kegiatan yang nantinya di dukung dengan alokasi anggaran dan belanja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang. Pada Tahun anggaran 2018 ini pencapaian indikator kinerja daerah di dilaksanakan oleh **11 program** dan **60 kegiatan**.
- e. Dari Evaluasi terhadap 11 program yang dilaksanakan sampai dengan semester 1 tahun 2018, keseluruhannya dapat mencapai target program yang telah di rencanakan pada awal tahun perencanaan tampak pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan sampai dengan Triwulan II Tahun 2018

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2018	Capaian TW 2 2018
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100	100%	100%
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	90	70%	55.52%
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	85	72	76%
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	55	35	68.66%
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	85%	76%	80%
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	100%	37.50%
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang esosial budaya	100%	100%	53.13%

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2018	Capaian TW 2 2018
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	100%	100%	0%
5	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama (MoU) yang ditindaklanjuti	4	2	2
6	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	95%	70%	42.86%
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	a. Rasio aparatur perencanaan berdasarkan belakang pendidikan :			
		S1	31%	39%	36.84%
		S2	55%	45%	44.74%
		b. Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran	95%	90%	2.70%
		c. Cakupan seminar/ workshop / pelatihan yang diselenggarakan Bappeda	100%	98%	0.00%
		d. cakupan peningkatan kapasitas aparatur perencana OPD	100%	100%	100%

Sumber: : Monev Renaksi Triwulan 2 Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Secara garis besar dalam penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi di antaranya:

1. Masih diperlukannya sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik.
2. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi.
3. Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Menjadi tidak ideal ketika yang memahami indikator dan ukurannya hanya pada tingkat kasubbag program.
4. Meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.
5. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global.

- f. Dari evaluasi terhadap 60 (enam puluh) kegiatan yang di laksanakan Bappeda pada tahun 2018 capaian output (fisik) kegiatan secara keseluruhan terhadap program dan kegiatan yang di laksanakan tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan 2 tahun 2018 seluruhnya sebesar **43.60%**.

Tabel di bawah ini merupakan capaian realisasi fisik dan keuangan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sampai dengan triwulan 2 tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Capaian realisasi Fisik dan Keuangan
Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang sd triwulan II Tahun 2018**

No.	Nama OPD/Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi anggaran Tw.II 2018	Realisasi fisik Tw.II 2018
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5,274,980,000	5,274,980,000	43.60%
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	12,264,000	12,264,000	
1	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	12,264,000	1.800.000	50%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	655,706,000	291,689,164	
2	Penyediaan jasa surat menyurat	719,000	442,000	70.00%
3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	101,430,000	35,852,719	50.00%
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7,710,000	4,462,275	50.00%
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	134,750,000	61,655,600	50.00%
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	64,396,000	31,021,544	50.00%
7	Penyediaan alat tulis kantor	17,081,000	8,519,000	50.00%
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21,586,000	2,670,313	50.00%
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,250,000	2,460,000	50.00%
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7,056,000	3,360,000	50.00%
11	Penyediaan bahan logistik kantor	14,981,000	2,404,000	50.00%
12	Penyediaan makanan dan minuman	30,734,000	10,120,500	60.00%

No.	Nama OPD/Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi anggaran Tw.II 2018	Realisasi fisik Tw.II 2018
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	166,450,000	88,493,626	60.00%
14	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	83,563,000	40,227,587	50.00%
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	315,386,000	102,310,899	
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	34,670,000	6,910,000	50.00%
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	192,640,000	83,305,899	60.00%
17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	11,676,000	600,000	50.00%
18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	70,900,000	11,495,000	50.00%
19	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5,500,000	0	50.00%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	114,128,000	14,675,000	
20	Workshop perencanaan pembangunan daerah	73,248,000	0	0%
21	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	40,880,000	14,675,000	35%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	55,051,000	10,951,400	
22	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	15,250,000	4,567,000	50.00%
23	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	8,500,000	400,000	20.00%
24	Penyusunan Rencana Kerja OPD	10,200,000	1,258,000	48.00%
25	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	16,455,000	115,400	20.00%
26	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4,646,000	4,611,000	100.00%
	Program Pengembangan data/informasi	59,078,000	5,322,000	
27	Penyusunan Profile Daerah	59,078,000	5,322,000	35%
	Program Kerjasama Pembangunan	200,000,000	44,822,252	
28	Fasilitasi FEDEP	200,000,000	44,822,252	40%

No.	Nama OPD/Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi anggaran Tw.II 2018	Realisasi fisik Tw.II 2018
	Program perencanaan pembangunan daerah	1,593,735,000	736,814,600	
29	Penyusunan rancangan RKPD	303,263,000	287,571,500	98.00%
30	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	133,400,000	123,151,600	100.00%
31	Penetapan RKPD	34,855,000	0	10.00%
32	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	18,871,000	4,556,000	35.00%
33	Forum OPD dan FGD	196,280,000	176,866,500	100.00%
34	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	49,000,000	0	30.00%
35	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	117,633,000	115,785,000	95.00%
36	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	131,425,000	0	0.00%
37	Penetapan Perubahan RKPD	29,330,000	0	0.00%
38	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	117,229,000	0	0.00%
39	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	48,124,000	10,471,000	40.00%
40	Penyusunan Standar Satuan Harga	164,075,000	15,556,000	45.00%
41	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	103,919,000	2,857,000	35.00%
42	Mapping Efektifitas Kinerja Kegiatan terhadap Pencapaian Indikator Program	146,331,000	0	20.00%
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	891,948,000	87,541,543	
43	Identifikasi Produk Unggulan Daerah	163,850,000	20,573,000	30.00%
44	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	127,360,000	34,018,543	40.00%
45	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemasaran Produk dan Jaringan Kemitraan	160,700,000	1,400,000	30.00%
46	Penyusunan Dokumen Peninjauan Kembali MKSB	214,077,000	31,550,000	30.00%
47	Penyusunan Dokumen Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar	225,961,000	0	0.00%
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	686,475,000	93,572,801	
48	Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	110,960,000	27,658,131	35.00%
49	Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak	101,134,000	19,164,200	75.00%

No.	Nama OPD/Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi anggaran Tw.II 2018	Realisasi fisik Tw.II 2018
50	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	54,000,000	4,533,000	35.00%
51	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	75,199,000	27,423,270	55.00%
52	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia	108,780,000	6,101,600	80.00%
53	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	29,733,000	3,542,000	30.00%
54	Penyusunan Dokumen Masterplan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	101.334.000	1,961,000	15.00%
55	Penyusun Dokumen Masterplan Rencana Induk Pariwisata Kota	105.335.000	3,189,600	70.00%
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	691,209,000	8,495,000	
56	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)	203.350.000	1,530,000	30.00%
57	Monitoring dan Evaluasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	89,169,000	1,200,000	25.00%
58	Moitoring dan Evaluasi Akses Universal 100-0-100	75,000,000	2,955,000	25.00%
59	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	90,000,000	1,200,000	25.00%
60	Penyusunan Dokumen Perencanaan Manajemen Persampahan	233,690,000	1,610,000	30.00%

Sumber : Laporan RFK Bulan Juni 2018 Bappeda Kota Magelang Tahun 2018

Secara keseluruhan capaian kinerja fisik kegiatan sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2018 relatif masih rendah. Dari Target fisik **49.40%** pada semester 1 tahun anggaran 2018, terealisasi sebesar **43.60%** atau masih di bawah target yang direncanakan pada semester 1. Rendahnya capaian fisik pada semester 1 disebabkan karena Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target keluaran yang direncanakan sampai dengan semester I Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa kegiatan yang dengan realisasi anggarannya mempunyai rentang/gap yang realitas besar dengan target yang di rencanakan atau realisasi anggarannya masih di bawah 50% . Selain itu juga masih terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya masih 0% atau di bawah 5%. Hal ini menjadi perhatian untuk lebih bisa memperhatikan percepatan pelaksanaan kegiatan, pencapaian target kegiatan yang tentu saja di sertai dengan percepatan realisasi anggaran sesuai dengan schedull kegiatan yang sudah di rencanakan.

Rendahnya capaian fisik kegiatan apabila di bandingkan dengan target realisasi pada Semester 1 Tahun Anggaran 2018, di antaranya di sebabkan oleh:

- a. Ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran belanja langsung per triwulan. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa kegiatan yang sudah di anggarkan pada triwulan pertama padahal kegiatan baru dimulai pada triwulan berikutnya atau bahkan sebaliknya;
- b. Perencanaan anggaran belanja langsung per triwulan yang terdapat di DPA belum sepenuhnya sesuai dengan *schedull* kegiatan;
- c. Pelaksanaan kegiatan belum di ikuti oleh serapan dana kegiatan sehingga ada ketimpangan antara capaian realisasi fisik dan capaian realisasi serapan anggaran. Hal ini menyebabkan target serapan anggaran triwulan tidak dapat terserap;
- d. Perlu kecermatan di dalam menghitung kebutuhan anggaran kegiatan sehingga anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan/mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan dalam laporan pertanggungjawaban;
- e. Terdapat beberapa kegiatan yang secara teknis mengalami perubahan sehingga perlambatan pelaksanaan atau penundaan pelaksanaan setelah Perubahan Anggaran seperti adanya perubahan kebijakan, penyesuaian atau penambahan anggaran kegiatan pada Perubahan Anggaran atau terkait masalah teknis kegiatan yang menyebabkan kegiatan tidak bisa di laksanakan sesuai dengan *schedull* kegiatan yang telah direncanakan.

Jika dilihat dari tingkat penyerapan anggaran kegiatan-kegiatan untuk Tahun 2018 sampai dengan triwulan II (realisasi pada akhir bulan Juni 2018) baru mencapai 26.50% atau sebesar Rp.1.397.994.659,- dari total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 5.274.980.000,-. Rendahnya capaian realisasi serapan anggaran pada semester 1 atau Triwulan II Tahun anggaran 2018 di sebabkan beberapa hal, di antaranya:

- a. Realisasi fisik kegiatan yang tidak di ikuti dengan realisasi serapan dana kegiatan sehingga terdapat *gap* antara realisasi fisik kegiatan dengan realisasi anggaran. Hal ini menyebabkan serapan anggaran Bappeda Kota Magelang sampai dengan triwulan ke dua relatif masih kecil (adanya beberapa kegiatan yang serapan anggarannya masih di bawah 10%),
- b. Adanya pengadaan barang dan jasa yang kegiatannya direncanakan pada penetapan anggaran namun sampai dengan saat ini belum dilaksanakan;
- c. Terdapat beberapa hal terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan kegiatan - kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan target dan *schedull* yang telah ditetapkan pada awal tahun kegiatan;
- d. adanya kegiatan-kegiatan yang menggunakan jasa pihak ketiga, yang sampai dengan bulan September masih dalam proses pengerjaan sehingga Pencairan Belanja Jasa Pihak Ketiga maupun Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber akan di cairkan setelah kegiatan tersebut selesai
- e. Adanya beberapa kegiatan yang prosesnya baru berjalan pada akhir tahun anggaran

Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk lebih meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Magelang serta langkah ke depan guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Terus mendorong dan mengimplementasikan sistem dan mekanisme forum perencanaan daerah yang partisipatif, transparansi dan akuntabel serta mengutamakan pelibatan masyarakat secara komprehensif, sehingga menghasilkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan;
- b. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur perencana daerah yang berwawasan luas dalam memahami konsep pemerintahan yang baik (*good governance*), desentralisasi dan demokratisasi serta meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur perencanaan Bappeda melalui bintek, diklat, pendidikan formal perencanaan serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.
- c. Penyusunan dokumen - dokumen perencanaan yang mengedepankan pembangunan keberlanjutan yang di dukung dengan data dan informasi bagi penguatan perencanaan daerah dan hasil-hasil penelitian. Serta peningkatan pengelolaan administrasi, data dan kearsipan yang di dukung dengan sarana prasarana yang cukup dan staf dengan kompetensi pendidikan yang memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan.
- d. Membuat database dan sistem informasi pembangunan daerah yang mencakup sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis teknologi informatika.
- e. Meningkatkan koordinasi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait dengan penanganan permasalahan - permasalahan di bidang fisik prasarana, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya secara komprehensif dan terpadu;
- f. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan.
- g. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, struktur organisasi dengan jumlah staf yang cukup dengan kompetensi pendidikan yang memadai dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga perencanaan;
- h. Mengelola anggaran dengan lebih efisien, efektif dan akuntabilitas dengan memperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran.
- i. Melakukan penguatan data untuk mendukung proses perencanaan, meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

- j. Melakukan pendekatan pemikiran dan langkah yang kreatif dan inovatif untuk menghadapi tantangan pada fungsi perencanaan semakin tinggi, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global.
- k. Strategi dan solusi yang dilakukan atas kendala terkait *dengan capaian sinergisitas sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja* maka dilakukan strategi melalui:
1. Peningkatan pemahaman yang sama antara lain terkait perumusan pokok-pokok pikiran DPRD dapat diwujudkan pada saat penyusunan Rancangan Awal sehingga dapat diintegrasikan lebih dini dalam perencanaan pembangunan daerah. Komunikasi lebih intensif antara Bappeda, Setwan dan DPRD menjadi kunci untuk mewujudkan hal tersebut.
 2. Evaluasi bersama pihak-pihak terkait hal ini, di level eksekutif integrasi sistem perencanaan dan penganggaran perlu didorong secara penuh untuk pengintegrasian. Komunikasi intensif dengan DPRD juga layak diupayakan.
 3. Peningkatan pemahaman di seluruh OPD secara internal maupun koordinasi antar SKPD dan Bappeda serta melalui sosialisasi dan workshop. TAPD saat mengawal dan verifikasi RKA harus mengacu pada RKPD.
 4. Peningkatan kualitas dan intensitas forum dialog perencanaan, *Focus Group Discussion* serta forum OPD membahas isu-isu strategis pembangunan.
 5. Peningkatan capacity building di seluruh OPD secara internal maupun koordinasi antar OPD dan Bappeda serta melalui sosialisasi dan workshop. TAPD saat mengawal dan verifikasi RKA harus mengacu pada dokumen perencanaan RKPD. Perluasan workshop pada seluruh level pada OPD dan pemahaman pada kepala OPD terkait perencanaan pembangunan daerah. Jika diperlukan ada medium paparan oleh Kepala OPD atas dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan seperti Renja dan Renstra serta Perjanjian Kinerja.
 6. Upaya peningkatan sistem manajemen data terpadu yang didukung oleh data OPD yang valid dan dinamis serta akuntabel.
 7. Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang *out of the box* yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada

Adapun solusi yang sudah dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan – permasalahan terkait penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan tersebut di antaranya :

1. Melakukan koordinasi intensif dengan legislatif dan Setwan agar penyampaian Pokok pikiran dewan dapat terkawal sesuai dengan target yang telah ditetapkan
2. melakukan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu menopang akuntabilitas dan transparansi atas perencanaan dan penganggaran sehingga deviasi dapat terkontrol dengan baik dan konsistensi mampu terjaga secara memuaskan.
3. Melaksanakan persamaan persepsi terhadap para eselon II dan jajarannya di seluruh OPD agar perencanaan dan pengawalan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dikendalikan secara komprehensif.
4. Terus melakukan upaya peningkatan kapasitas personil perencanaan dan penguatan data atas hasil monitoring evaluasi serta aksesibilitas data yang valid dan tepat waktu
5. Peningkatan kapasitas *core business* perencanaan dan penguatan mindset organisasi pembelajar yang tangguh dan antisipatif terhadap dinamika yang berkembang.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2017 dan capaian pada semester 1 tahun 2018 adalah sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.3 berikut :

TABEL ADA DI EXCEL

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Perubahan Renja tahun 2018 merupakan tahun kedua perencanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang periode 2016 – 2021. Mengingat Perubahan Renja 2018 yang disusun pada tahun ini telah disesuaikan/berpedoman pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021. Hal tersebut guna menjaga kesinambungan program pemerintah di urusan penunjang perencanaan pembangunan serta untuk mencapai tujuan Magelang sebagai Kota Jasa yang berbudaya, maju dan berdaya saing dalam masyarakat madani. Tingkat capaian kinerja dalam rangka dukungan terhadap pencapaian visi misi Walikota Magelang. Salah satunya adalah berfokus pada bagaimana menciptakan SDM aparatur yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas dan responsifitas

Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah berperan dalam penyusunan pembangunan makro dan integratif seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD beserta dokumen prasyarat yang dibutuhkan. Setiap tahunnya Bappeda melaksanakan penyusunan dokumen RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) yang merupakan penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan menampung aspirasi kebutuhan masyarakat melalui musrenbang yang dilakukan dari tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota. Selain penyusunan RKPD, Bappeda juga melakukan penyusunan dokumen perencanaan terkait isu-isu yang menjadi tema pembangunan Kota Magelang pada tahun terkait.

Tingkat capaian kinerja yang dilaksanakan oleh OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka dukungan terhadap pencapaian visi misi Walikota Magelang, program dan kegiatan Bappeda Kota Magelang mendukung pada pencapaian misi pertama, *"Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat di dukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat"*.

Dalam pencapaian misi pertama, sasaran yang akan di capai adalah a). mewujudkan perencanaan daerah yang partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel serta b). meningkatkan kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan. Dalam lima tahun ke depan Bappeda Kota Magelang berupaya untuk mendukung dalam pencapaian kualitas perencanaan pembangunan yang semakin baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat menampung aspirasi kebutuhan riil masyarakat.

Penyusunan Perubahan Renja 2018 berdasarkan pada RKPD Perubahan Tahun 2017 yang mengacu pada RPJMD tahun 2016-2021 dan berpedoman pada perencanaan jangka panjang Kota Magelang sebagaimana tertuang di dalam

RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025, yaitu untuk mencapai tujuan Magelang sebagai Kota jasa yang berbudaya, maju dan berdaya saing dalam masyarakat madani. Prioritas pencapaian sasaran pembangunan daerah disusun secara seksama mengingat banyaknya program yang harus dijalankan dengan keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk pembiayaan pembangunan. Sehingga tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Prioritas pelaksanaan pembangunan di dasarkan pada penyelesaian isu – isu strategis dan tema pembangunan yang telah di susun secara bertahap dalam RPJMD Pemerintah Kota Magelang. Selain itu juga memperhatikan pencapaian indikator kinerja daerah dan indikator kinerja OPD yang telah di tetapkan pada awal tahun perencanaan

Pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada semester 1 tahun 2018 secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021, yang berarti target dalam Renstra hampir semua tercapai atau dengan kata lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi beban tahun yang bersangkutan. Hal tersebut tercermin dalam Tabel 2.4 yang berisi Rekapitulasi, Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.

Adapun pencapaian target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada triwulan II tahun 2018 adalah sebagaimana Tabel 2.4 berikut:

di EXCEL

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Terbitnya Undang undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dampak yang begitu nyata dalam jalannya pemerintah daerah. Salah satunya adalah perubahan SOTK daerah yang akan mengacu pada urusan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

Mendasarkan pada Undang – Undang tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang bukan lagi sebagai pemegang urusan perencanaan pembangunan daerah melainkan sebagai urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan daerah. Hal tersebut memiliki *implikasi logis* diantaranya adalah bergesernya program program yang selama ini dilaksanakan oleh Bappeda Kota Magelang termasuk diantaranya urusan tata ruang, urusan perumahan dan persampahan akan berpindah menjadi kewenangan perangkat daerah yang mengemban urusan tersebut.

Munculnya SOTK baru yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah dan Peraturan Walikota Magelang nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, memberikan warna yang berbeda pada susunan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang. Perubahan struktur Organisasi berpengaruh pada beban kerja, kewenangan dan indikator kinerja yang akan di tuangkan di dalam dokumen perencanaan. Terkait dengan perubahan struktur organisasi tersebut, hal yang sudah dilakukan adalah dengan melakukan perubahan Renstra pada awal tahun 2017. Hal ini menjadi relevan dan *urgens* sehingga memerlukan energi ekstra bagi seluruh personil Bappeda untuk dapat memberikan arah yang benar untuk mendukung pencapaian Visi Misi Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan OPD, jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja dan SPM sudah mampu dipenuhi dan dilaksanakan. Pencapaian dari segi kuantitas sudah dapat dicapai tetapi masih perlu dikaji lagi tingkat pencapaian dari segi kualitas dokumen yang dihasilkan. Sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan mulai dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan yaitu RTRW dan RDTRK. Serta perlu dilihat juga sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan ruang, dimana RTRW dijadikan sebagai bahan telaahan dalam penyusunan RPJMD. Melihat hasil evaluasi kinerja pelayanan SKPD, pencapaian indikator kinerja dan SPM sudah mampu dipenuhi dan dilaksanakan. Pencapaian dari segi kuantitas sudah dapat dicapai tetapi masih perlu dikaji lagi tingkat pencapaian dari segi kualitas dokumen yang dihasilkan. Sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan mulai dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan yaitu RTRW dan RDTRK.

Isu SDGs (*Sustainable Development Goals*) sebagai kelanjutan paska agenda MDGs yang menjadi isu nasional secara tidak langsung akan mendorong daerah khususnya Kota Magelang untuk mengintervensi kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target MDGs yang ditargetkan tuntas pada tahun 2016. Bappeda sebagai *leading sector* perencanaan pembangunan di daerah memiliki peran penting dalam perencanaan kegiatan yang mendorong pencapaian target tersebut. Evaluasi terhadap capaian tiap tahunnya juga diperlukan untuk mengetahui sejauh mana target yang telah dicapai sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya.

Beberapa isu baik yang bersifat lokal, regional maupun nasional yang telah tercover di dalam dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2018 juga harus terkawal baik termasuk dalam hal penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasinya juga harus mendapatkan alokasi yang proporsional. Isu- isu tentang kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan wilayah serta implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan kelanjutan implementasi post MDGs yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) juga tidak boleh luput dari kawalan perencanaan di tataran Kota Magelang. Pengendalian dan evaluasi atas implementasi Magelang Kota Sejuta Bunga serta Monev pelaksanaan Smart City dan untuk direncanakan pada tahun perencanaan.

ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah dilaksanakan pada Desember 2015 perlu dilakukan implementasi baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Adanya kebebasan arus barang, jasa dan modal memiliki keuntungan dan kerugian tergantung bagaimana kita memposisikan diri kita. Promosi dan pemasaran produk bisa menjadi sangat luas ketika produk tersebut mempunyai keunggulan kompetitif dan akan menjadi bumerang ketika produk tersebut tidak mampu bersaing dengan pasar. Jika hal ini terjadi, maka kita akan semakin terpuruk karena kita hanya akan berperilaku konsumtif tanpa memproduksi apapun. Untuk itu diperlukan antisipasi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ini. Kota Magelang telah menyiapkan Rencana Aksi Daerah dalam rangka antisipasi Masyarakat Ekonomi ASEAN ini tinggal bagaimana implementasi terhadap rencana aksi dimaksud.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan pelayanan dasar harus tetap berfokus pada penurunan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses pelayanan kesehatan. Terkait dengan isu kemiskinan Kota Magelang yang harus terus di kawal dalam pengentasannya masih sangat strategis untuk di koordinir perencanaannya. Untuk itu perlu ditinjau kembali dokumen yang sudah ada saat ini untuk dapat dilakukan review dan perubahan yang menyesuaikan dinamika kemiskinan Kota Magelang.

Hal lain yang menjadi isu dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pengembangan Kota Cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal. Pengembangan kota Cerdas ini berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka penguatan daya saing dan kemandirian daerah, pengembangan Branding Kota Magelang serta upaya untuk menciptakan iklim

kondusif yang mendukung peningkatan investasi daerah yang di dukung dengan peningkatan kreativitas dan penguasaan pengetahuan dan teknologi

Jalinan kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat dan Pihak swasta masih menjadi isu yang sejalan dengan Tema Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2016-2017, di mana dengan jalinan kemitraan ini Pemerintah akan mencoba untuk bersama-sama dalam menyusun perencanaan, melaksanakan pembangunan, menyelesaikan permasalahan – permasalahan pembangunan yang nantinya secara bersama – sama akan mencapai tujuan daerah sebagaimana ada pada dokumen - dokumen perencanaan. Peningkatan peran serta masyarakat menjadi penting serta mewujudkan keadilan dan pemerataan hasil pembangunan tanpa adanya diskriminasi.

Hal lain yang masih menjadi isu sejalan dengan prioritas Nasional maupun prioritas provinsi adalah Penguatan reformasi birokrasi, yang meliputi beberapa bidang di antaranya : a). peningkatan tata kelola pemerintahan; b). pengelolaan aset daerah; c). peningkatan kualitas layanan publik; d). penataan organisasi; e). Penataan tata laksana; f). Penataan Sistem Manajemen SDM aparatur; g).Penguatan Pengawasan dan h). Penguatan akuntabilitas Kinerja.

Dalam rangka mencapai misi Kota Religius, penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah menjadi satu hal yang penting mengingat *impact* dari masyarakat religius adalah menurunnya angka kriminalis serta terciptanya dan terpeliharanya stabilitas daerah, keamanan dan ketertiban. Tujuan akhir dari terciptanya masyarakat religius sebagaimana terdapat dalam dokumen RPJMD adalah menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religius dan mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman dan nyaman.

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan di antaranya terkait dengan a). Sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik perlu dilakukan dengan pemahaman yang sama antara lain terkait perumusan pokok-pokok pikiran DPRD. b). Adanya ego atau kepentingan antarsektor yang mengakibatkan adanya kesulitan dan miskoordinasi. Disamping itu persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya; c). Perlunya pemahaman yang sama di OPD terkait urgensi dan signifikansi perencanaan pembangunan daerah beserta indikator-indikator keberhasilan di masing-masing urusan yang diemban pada setiap level struktural. Hal ini akan meningkatkan fokus pencapaian indikator sebagai garda depan perencanaan dan penganggaran, bukan perencanaan penganggaran yang *incremental*; d).Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi, antara lain dengan integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi; e). Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari

hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/ telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah; f). Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya; dan, g). Perlunya optimalisasi monitoring dan evaluasi hasil Renja SKPD maupun RKPD sehingga tahapan dan isu permasalahan antara bisa disolusikan bersama SKPD dan Bappeda serta implementasi *e-Monev* untuk kecepatan dan keakuratan serta ketertelusuran progress pelaksanaan Renja maupun RKPD.

Selain hal – hal tersebut di atas, dalam penyusunan dokumen perencanaan ini perlu pula memperhatikan isu – isu regional Propinsi yang berpengaruh terhadap kondisi di daerah dan penanganannya perlu dilakukan melalui program dan kegiatan yang akan di rumuskan di dalam dokumen renja OPD. Mendasarkan berbagai permasalahan pembangunan di Jawa Tengah, maka isu strategis pembangunan Jawa Tengah sebagaimana di sebutkan di dalam dokumen RKPD Kota Magelang tahun 2019, sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi isu pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019, mengingat sampai dengan bulan Maret Tahun 2017 persentase kemiskinan Jawa Tengah masih cukup tinggi sebesar 13,01% dan masih di atas rata-rata nasional sebesar 10,64%, akan tetapi tren penurunan kemiskinan Jawa Tengah lebih baik (0,39%/tahun dalam periode 2013-2017) dibanding tren penurunan tingkat kemiskinan Nasional (0,26%/tahun dalam periode 2013-2017).

2. Daya saing ekonomi

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2016 tumbuh sebesar 5,28 % dan sampai dengan triwulan III tahun 2017 perekonomian Jawa Tengah tercatat tumbuh sebesar 5,13%. Industri yang tumbuh masih didominasi oleh industri padat karya dengan tingkat serapan buruh berpendidikan dan ketrampilan rendah, serta mengolah bahan baku impor dan barang modal impor; Investasi yang mendasarkan ketersediaan buruh dengan upah kerja yang murah masih mendominasi, investasi pada sektor jasa, pariwisata dan pengolahan atas sumber daya alam serta berteknologi tinggi masih rendah, sektor produksi masih didominasi pada skala UMKM dengan kondisi kurang efisien, lemah pada akses permodalan dan daya saing produk UMKM di pasar; kesenjangan wilayah dan antar kelompok yang masih belum baik.

3. Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia

IPM Jawa Tengah Tahun 2016 sebesar 69,98 Angka ini masih dibawah angka nasional sebesar 70,18. Kondisi ini terutama ditunjukkan dari komponen rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita (yang disesuaikan). Kondisi ini berkaitan juga dengan kualitas dan daya serap tenaga kerja yang terbesar adalah lulusan SD. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja global. Isu lain berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan

bonus demografi dimana usia produktif akan lebih besar dibandingkan usia non produktif. Tantangannya selain terkait dengan kualitas SDM juga terkait isu radikalisme, terorisme, dan ancaman NAPZA ancaman terbesarnya adalah penduduk usia produktif. Sehingga perlu upaya antisipasi melalui perkuatan mental dan spiritual masyarakat

4. Kedaulatan Pangan dan Energi

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Tantangannya tidak hanya terkait dengan ketersediaan dan kecukupan pangan utama, tetapi juga bagaimana meningkatkan keberagaman konsumsi pangan masyarakat, agar tercukupi kebutuhan gizi masyarakat. Tantangan lain adalah bagaimana menyiapkan produk pangan kita berorientasi ekspor, dan mampu bersaing di pasar global nasional, baik produk pangan mentah maupun olahan. Penyediaan energi untuk industri, perlu penguatan kehandalan sistem serta sistem pasokan bagi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam upaya mendorong investasi dan perlunya pemerataan ketersediaan listrik utamanya untuk Rumah Tangga Miskin, serta peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan yang masih rendah

5. Kesenjangan Wilayah

Wilayah Jawa Tengah saat ini perkembangannya belum merata, yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,6 di tahun 2016. Daerah Kabupaten di bagian selatan Jawa Tengah dan Kabupaten yang berada di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur dan Jawa Barat relatif kurang maju dibanding wilayah Pantura dan Pusat Pemerintahan di Semarang dan Pusat pertumbuhan Surakarta. Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa. Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai. Selain itu tantangan lain adalah penyediaan sarana dasar seperti rumah layak huni, dengan dilengkapi fasilitas sanitasi, air bersih layak, dan listrik.

6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang cukup penting. Karena isu sumberdaya alam dan lingkungan hidup ini sudah menjadi isu global dan nasional, terutama terkait dengan isu perubahan iklim. Selain itu, kerusakan ekosistem pesisir dan laut perlu menjadi perhatian, untuk mempertahankan keberlanjutan pembangunan. Isu yang saat ini mencuat antara lain pencemaran lingkungan, pertambangan ilegal dan dampaknya, kerusakan hutan dan lahan, konflik pengelolaan hutan, krisis air, sekaligus bencana kekeringan, dan lainnya.

7. Tata kelola Pemerintahan

Tuntutan peningkatan kualitas profesionalisme dan pengembangan kompetensi SDM aparatur, sistem informasi manajemen pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online yang terintegrasi dan paperless, peningkatan akuntabilitas

kinerja dan reformasi birokrasi dalam rangka *good governance* dan *clean government*, peningkatan ketahanan ideologi Pancasila, pencegahan intoleransi umat beragama, radikalisme, terorism, *hate speech* dan *hoax news* dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah

Di dalam menentukan prioritas pembangunan di dalam dokumen perencanaan, berangkat dari analisis terhadap isu – isu strategis. Kriteria yang digunakan untuk penentuan isu strategis yaitu: (i) memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan tugas dan tanggungjawan Pemerintah Daerah; (iii) dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat; (iv) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; (v) Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani; dan (vi) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Di dalam dokumen Perubahan RKPD 2018, isu strategis ini diperoleh setelah melakukan analisis isu, dilakukan proses pembobotan isu, dan konsultasi publik, maka ditarik kesimpulan bahwa terdapat isu strategis sebagai berikut:

1. Penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan penciptaan lapangan kerja
2. Peningkatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial
3. Penguatan reformasi birokrasi
4. Peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat serta kondusivitas daerah
5. Pengelolaan persampahan
6. Peningkatan koperasi, usaha mikro dan perdagangan
7. Penguatan daya saing dan kemandirian daerah
8. Peningkatan kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama
9. Penerapan prinsip prinsip kota cerdas
10. Penguatan kemitraan dalam pembangunan daerah
11. Peningkatan daya saing dan daya jual pariwisata
12. Penguatan implementasi Branding Magelang Kota Sejuta Bunga
13. Pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah
14. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
15. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan
16. Peningkatan ketahanan pangan
17. Keadilan gender dan perlindungan anak
18. Peningkatan kreativitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
19. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga

Dari isu-isu strategis tersebut, dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) kelompok payung besar isu strategis Kota Magelang yaitu:

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi);

- c. Penguatan reformasi birokrasi;
- d. Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri;
- e. Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal;
- g. Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan;
- h. Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah.

Terkait dengan isu strategis di atas baik isu strategis Nasional, Propinsi Jawa Tengah maupun Kota Magelang, maka dalam pengambilan kebijakan pada ranah perencanaan hal ini harus dijadikan sebagai landasan, terutama di dalam menerjemahkan kebijakan menjadi program dan kegiatan yang menjadi alat untuk menjawab permasalahan dan isu – isu strategis yang di hadapi daerah.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan di antaranya terkait dengan Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat, perlunya upaya untuk meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi serta meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi teknologi informasi. Pelayanan berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung smart city dan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih besar pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan dan pencapaian kinerja atas hal tersebut diatas dibutuhkan kapasitas sumber daya manusia aparatur perencanaan di Bappeda yang berkualitas dengan kuantitas yang cukup harus disiapkan dengan baik. Oleh karena itu skenario Workshop perencanaan daerah akan tetap menjadi strategis. Selain itu sosialisasi bagi seluruh personil Bappeda dan para Kasubbag program tentang update dan implementasi atas aturan regulasi terkini harus tetap dilaksanakan secara periodik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan Sumber daya perencanaan di Kota Magelang

Untuk mengawal isu dan *core business* perencanaan tersebut diperlukan skenario peningkatan kapasitas personil perencanaan Bappeda Kota Magelang. Selain itu kebutuhan akan sarana prasarana kantor baik berupa peralatan perlengkapan maupun kantor yang kondusif dan nyaman untuk mendukung kinerja perencanaan juga harus dipertimbangkan untuk direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah salah satu acuan OPD dalam penyusunan Renja OPD, selain RENSTRA OPD. RKPD disusun dalam rangka sinkronisasi pembangunan daerah. Oleh karenanya rancangan awal RKPD seyogyanya diketahui secara umum oleh seluruh OPD untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan OPD terkini.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang kemudian mereview rancangan awal RKPD yang

disandingkan dengan kebutuhan OPD dengan hasil bahwa program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja OPD sudah tercantum semua dalam rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Rancangan awal RKPD pada Bab II Sub Bab Permasalahan Pembangunan, beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan yaitu:

- a. Masih diperlukannya sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik. Sebagai contoh untuk Pokok pikiran DPRD sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, diamanatkan untuk disampaikan kepada Eksekutif dalam hal ini Bappeda sejak Rancangan Awal RKPD Tahun rencana (Januari), namun demikian selama ini hal tersebut belum bisa terwujud. Sehingga capaian indikator Tingkat Ketersediaan Pokok Pikiran Dewan tepat waktu baru dapat tercapai 50%
- b. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi
- c. Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Menjadi tidak ideal ketika yang memahami indikator dan ukurannya hanya pada tingkat kasubbag program.
- d. Meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.
- e. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global .

**TABEL 2.3 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN
RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG S/D TRIWULAN II TAHUN 2018**

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
	BAPPEDA											
4.03.4.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terfasilitasinya program pelayanan administrasi perkantoran	100%	14 kegiatan	14 kegiatan	14 kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	
4.03.4.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	85 materai 6 paket	85 materai 6 paket	85 materai dan 10 paket pengiriman (12 bulan)	100%	
4.03.4.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Layanan jasa komunikasi via telepon, dan layanan listrik	2 item (12 bulan)	2 item (12 bulan)	2 item (12 bulan)	2 item (12 bulan)	100%	2 rekening telepon 1 rekening listrik	2 rekening telepon 1 rekening listrik	2 nomor rek telp, 1 rek listrik (12 bulan)	100%	
4.03.4.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perijinan kendaraan dinas/operasional	27 (22 sepeda motor dan 5 mobil)	27 (22 sepeda motor dan 5 mobil)	27 (22 sepeda motor dan 5 mobil)	27 (22 sepeda motor dan 5 mobil)	100%	6 unit sepeda motor, 4 mobil)	6 unit sepeda motor, 4 mobil)	27 (22 sepeda motor dan 5 mobil)	100%	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
4.03.4.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium pengelolaan keuangan daerah dan tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan Bappeda	11 orang, 24 bendel (laporan keu dan SPJ bulanan)	11 orang, 24 bendel (laporan keu dan SPJ bulanan)	11 orang, 24 bendel (laporan keu dan SPJ bulanan)	11 orang, 24 bendel (laporan keu dan SPJ bulanan)	100%	11 orang, 12 bendel (laporan keu dan SPJ bulanan)	11 orang, 12 bendel (laporan keu dan SPJ bulanan)	11 orang, 24 bendel (laporan keu dan SPJ bulanan)	100%	
4.03.4.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan, bahan pembersih kantor, jasa tenaga kebersihan gedung kantor dan lingkungan kantor dan jasa kebersihan serta perawatan taman	26 item kebersihan, 4 jenis jasa tenaga kebersihan (12 bulan)	31 item kebersihan, 4 jenis jasa tenaga kebersihan (12 bulan)	31 item kebersihan, 4 jenis jasa tenaga kebersihan (12 bulan)	31 item kebersihan, 4 jenis jasa tenaga kebersihan (12 bulan)	100%	31 item kebersihan 3 tenaga kebersihan	31 item kebersihan 3 tenaga kebersihan	31 item peralatan kebersihan, 3 tenaga kebersihan (12 bulan)	100%	
4.03.4.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	31 item ATK (12 bulan)	31 item ATK (12 bulan)	31 item ATK (12 bulan)	31 item ATK (12 bulan)	100%	30 item ATK	30 item ATK	30 item ATK (12 bulan)	100%	
4.03.4.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya kegiatan cetakan, fotocopy dan jilid administrasi perkantoran	3 item barang cetakan, penggandaan dan penjilidan (12 bulan)	3 item barang cetakan, penggandaan dan penjilidan (12 bulan)	3 item barang cetakan, penggandaan dan penjilidan (12 bulan)	3 item barang cetakan, penggandaan dan penjilidan (12 bulan)	100%	3 item barang cetakan, fc, jilid	3 item barang cetakan, fc, jilid	3 item barang cetakan, penggandaan dan penjilidan (12 bulan)	100%	
4.03.4.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 item (12 bulan)	14 item (12 bulan)	14 item (12 bulan)	14 item (12 bulan)	100%	8 komponen	13 komponen	14 item (12 bulan)	100%	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga	-	8 jenis	-	-	-	-	-	-	-	
4.03.4.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jasa pelayanan surat kabar bulanan	5 jenis surat kabar (12 bulan)	5 jenis surat kabar (12 bulan)	5 jenis surat kabar (12 bulan)	5 jenis surat kabar (12 bulan)	100%	5 jenis surat kabar	5 jenis surat kabar	5 jenis surat kabar (12 bulan)	100%	
4.03.4.03.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan isi ulang tabung gas	14 kali pengisian ulang (12 bulan)	14 kali pengisian ulang (12 bulan)	14 kali pengisian ulang (12 bulan)	14 kali pengisian ulang (12 bulan)	100%	8 kali pengisian ulang dan 6 kali pengisian BBM Genset	8 kali pengisian ulang dan 9 kali pengisian BBM Genset	18 kali pengisian ulang dan BBM Genset (12 bulan)	100%	
4.03.4.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jamuan makan/minum rapat, jamuan tamu dan harian pegawai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	46 pegawai 10 rapat 60 tamu	46 pegawai 8 rapat 78 tamu	46 pegawai, 20 rapat, 150 tamu (12 bulan)	100%	
4.03.4.03.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah selama 1 tahun anggaran	12 bulan	12 bulan	12 bulan (53 kali)	12 bulan (53 kali)	100%	22 Perjalanan dinas luar daerah	39 Perjalanan dinas luar daerah	45 Perjalanan dinas luar daerah (12 bulan)	100%	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
4.03.4.03.01.01.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Belanja jasa tenaga kontrak/tenaga tidak tetap/penjaga malam dan operator telepon	3 orang tenaga kontrak (12 bulan)	3 orang tenaga kontrak (12 bulan)	4 orang tenaga kontrak (12 bulan)	4 orang tenaga kontrak (12 bulan)	100%	1 orang tenaga kontrak, 1 orang front office, 2 orang penjaga	1 orang tenaga kontrak, 1 orang front office, 2 orang penjaga	1 orang tenaga kontrak, 1 orang front office, 2 orang penjaga (12 bulan)	100%	
4.03.4.03.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terfasilitasinya peningkatan sarpras aparatur	97%	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	100%	93%	93%	93%	100%	
4.03.4.03.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	BM pengadaan tangga lipat multifungsi, rak arsip, AC ruang rapat (tahun 2016)	4 jenis	4 jenis	-	-	-	-	-	-	-	
		BM pengadaan genset,LCD Proyektor, Etalase kaca, papan tulis, papan aklirik, AC, Drone+camera, mesin penjawab telepon, CCTV (tahun 2017)	-	-	9 jenis	9 jenis	100%	-	-	-	-	
4.03.4.03.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	BM LED Proyektor, CPU, alat perekam suara, amplifier	4 jenis	6 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	-	-	-	-	
		BM PC, Notebook dan printer										

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
4.03.4.03.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jenis pemeliharaan gedung kantor, aula dan lingkungan gedung kantor	2 jenis pemeliharaan gedung (12 bulan)	2 jenis pemeliharaan gedung (12 bulan)	2 jenis pemeliharaan gedung (12 bulan)	2 jenis pemeliharaan gedung (12 bulan)	100%	3 jenis pemeliharaan gedung	2 jenis pemeliharaan gedung	2 jenis pemeliharaan gedung	100%	
4.03.4.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional kantor	27 (22 sepeda motor dan 5 mobil)	27 (22 sepeda motor dan 5 mobil)	27 (22 sepeda motor dan 5 mobil)	27 (22 sepeda motor dan 5 mobil)	100%	25(20 sepeda motor dan 5 mobil)	25(20 sepeda motor dan 5 mobil)	25(20 sepeda motor dan 5 mobil)	100%	
4.03.4.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Belanja jasa pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	11 item perlengkapan gedung kantor	11 item perlengkapan gedung kantor	11 item perlengkapan gedung kantor	11 item perlengkapan gedung kantor	100%	5 item perlengkapan gedung kantor	4 item perlengkapan gedung kantor	11 item perlengkapan gedung kantor	100%	
4.03.4.03.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Belanja jasa pemeliharaan alat kantor, rumah tangga dan jaringan	14 item peralatan gedung kantor dan jaringan	14 item peralatan gedung kantor dan jaringan	14 item peralatan gedung kantor dan jaringan	14 item peralatan gedung kantor dan jaringan	100%	6item peralatan gedung kantor dan jaringan	7 item peralatan gedung kantor dan jaringan	14 item peralatan gedung kantor dan jaringan	100%	
4.03.4.03.01.02.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Belanja jasa pemeliharaan mebelair	4 item barang meubelair (12 bulan)	4 item barang meubelair (12 bulan)	4 item barang meubelair (12 bulan)	4 item barang meubelair (12 bulan)	100%	2 item barang meubelair	2 item barang meubelair	4 item barang meubelair (12 bulan)	100%	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Luasan gedung kantor yang direhab (kamar mandi, gudang, ruang rapat, pantry, ruang laktasi)	-	5,978	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03.4.03.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD	Rasio aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan:										
		a. S1	31%	52.63%	53%	52.63%	99.30%	36.84%	36.84%	40.54%	100%	
		b. S2	55%	33.33%	23%	33.33%	144.91%	44.74%	44.74%	46.95%	100%	
		c. S3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
		Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran	95%	86.84%	85%	86.84%	102%	5.40%	5.40%	87%	100%	
		Cakupan seminar/workshop/ pelatihan yang diselenggara- kan Bappeda	100%	100%	95%	100%	105.26%	0%	0%	95%	100%	
		akupan peningkatan kapasitas aparatur perencana OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.03.4.03.01.05.07	Workshop perencanaan pembangunan daerah	Peserta yang mengikuti workshop perencanaan	45 orang	41 orang	41 orang	41 orang	100%	0 orang	0 orang	45 orang	100%	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
4.03.4.03.01.05.08	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya sosialisasi perencanaan pembangunan	100 orang	350 orang	350 orang	350 orang	100%	29 opd	29 opd	29 opd	100%	
4.03.4.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terfasilitasnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	
4.03.4.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	6 laporan	6 laporan	12 laporan	100%	
4.03.4.03.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Adanya laporan prognosis dan realisasi anggaran	6 buku	6 buku	6 buku	6 buku	100%	0 buku	0 buku	6 buku	100%	
4.03.4.03.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	5 buku	5 buku	5 buku	5 buku	100%	-	-	-	-	
4.03.4.03.01.06.06	Penyusunan Renja OPD	Dokumen Renja Penetapan dan Renja Perubahan	2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	100%	0 jenis dokumen	0 jenis dokumen	2 jenis dokumen	100%	
4.03.4.03.01.06.08	Penyusunan RKA-SKPD	Dokumen RKA dan RKPA	2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	100%	0 jenis dokumen	0 jenis dokumen	2 jenis dokumen	100%	
4.03.4.03.01.06.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Dokumen Perubahan Renstra OPD	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-	-	
4.03.4.03.01.06.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) SKPD	Tersedianya dokumen LLKJIP Bappeda	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
4.03.4.03.01.15	Program Pengembangan data/informasi	Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	95%	100%	90%	92%	202.22%	50.00%	42.86%	90%	100%	
4.03.4.03.01.15.05	Penyusunan Profile Daerah	Tersedianya buku profil/SIPD Kota Magelang dan per kecamatan Tahun 2016	40 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100%	70 buku profil Kota, 40 buku profil kecamatan	70 buku profil Kota, 40 buku profil kecamatan	70 buku profil Kota, 40 buku profil kecamatan	100%	
1.08 . 1.06.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan											
1.08 . 1.06.01 . 15 . 09	Kerja sama pengelolaan sampah antar daerah	Adanya MoU koordinasi untuk kerja sama pengelolaan sampah dengan Kabupaten Magelang	-	0 MOU	-	-	-	-	-	-	-	Sampai dengan akhir tahun, kegiatan ini masih berupa draft akhir MoU, namun belum di tanda tangani oleh pihak terkait (Dirjen PLP, Gubernur Jateng, Bupati Magelang dan Walikota Magelang)
1.04 . 1.06.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rusunawa dan rusunama yang layak huni			2							
1.04 . 1.06.01 . 01 . 15 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terfasilitasinya program PLPBK	-	1 paket	-	-	-	-	-	-	-	Program tersebut setelah SOTK baru, tidak menjadi urusan kewenangan dari OPD Bappeda

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
1.05 . 1.06.01 . 01 . 15	Program Perencanaan Tata Ruang											
1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 . 18	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL	Jumlah dokumen Raperda RDTRK BWP 4, 3 dan 5	-	45 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	Program tersebut setelah SOTK baru, tidak menjadi urusan kewenangan dari OPD Bappeda
1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 . 25	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	jumlah koordinasi yang dilakukan oleh tim BKPRD	-	12 bulan	-	-	-	-	-	-	-	Program tersebut setelah SOTK baru, tidak menjadi urusan kewenangan dari OPD Bappeda
1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 . 54	Review raperda RTRW Kota Magelang	Jumlah dokumen evaluasi RTRW Tahun 1	-	10 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	Program tersebut setelah SOTK baru, tidak menjadi urusan kewenangan dari OPD Bappeda
4.03.4.03.01.16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	4 MOU	2 MOU	2 MOU	2 MOU	100%	2 MOU	2 MOU	3 MOU	100%	
4.03.4.03.01.16.07	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Jumlah rakor FEDEP, PEL dan Pameran	4 kegiatan	10 kali kegiatan	-	-	-	10 kali kegiatan	10 kali kegiatan	10 kali kegiatan	100%	
		- Rapat Koordinasi			4	4	rakor	0 rakor	0 rakor	4 rakor		
		- Pameran			4	4	pameran	1 pameran	1 pameran	2 pameran		
		- Pelatihan UMKM			2	2	pelatihan	0FGD	0FGD	2 FGD		

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
4.03.4.03.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah											
		Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100.0%	100.0%	100%	100%	
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	90%	65%	70%	70.22%	100.31%	65.00%	55.52%	70%	100%	
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	85%	70%	72%	72.08%	100.11%	65.00%	76.00%	72%	100%	
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	55%	35%	35%	36%	102.86%	40.00%	68.66%	35%	100%	
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	85%	76%	71.145%	93.61%	101.35%	75.00%	80.0%	76%	100%	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 05	Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah dokumen rancangan awal dan dokumen RPJMD Kota Magelang Tahun 2015-2019	200 buku	200 buku	-	-	-	-	-	-	-	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 06	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Tersedianya naskah kesepakatan musrenbang RKPD	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	-	-	-	-	-	-	-	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
4.03.4.03.01.21.08	Penyusunan rancangan RKPd	Jumlah buku rancangan awal RKPd Kota Magelang dan Rancangan Kota Magelang	150 buku	300 buku	300 buku	300 buku	100%	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	
4.03.4.03.01.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPd	Penyelenggaraan Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPd Kota Magelang Tahun 2016	100 orang peserta musrenbang	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	
4.03.4.03.01.21.10	Penetapan RKPd	Tersedianya buku RKPd Kota Magelang	150 buku	150 buku	150 buku	150 buku	100%	150 buku	150 buku	150 buku	100%	
4.03.4.03.01.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Tersedianya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Monev)	100 buku	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	4 laporan	100%	
4.03.4.03.01.21.14	Forum OPD dan FGD	Terselenggaranya Forum SKPD dan forum diskusi	1 kegiatan	200 orang	200 orang	200 orang	100%	1 forum OPD dan 9 FGD	1 forum OPD dan 9 FGD	1 forum OPD dan 9 FGD	100%	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
4.03.4.03.01.21.19	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya poster dan kalender sebagai alat publikasi kegiatan perencanaan pembangunan daerah	20 buku	20 poster 150 kalender	20 poster 150 kalender	20 poster 150 kalender	100%	1 media publikasi	1 media publikasi	3 media publikasi	100%	
4.03.4.03.01.21.31	Pelaksanaan Verifikasi Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja yang akan diverifikasi	29 dokumen OPD	46 dokumen SKPD	46 dokumen SKPD	46 dokumen SKPD	100%	29 dokumen OPD	29 dokumen OPD	29 dokumen OPD	100%	
4.03.4.03.01.21.35	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	Jumlah dokumen rancangan perubahan RKPD	150 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100%	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100%	
4.03.4.03.01.21.36	Penetapan Perubahan RKPD	Tersedianya buku penetapan perubahan RKPD Kota Magelang	100 buku	150 buku	150 buku	150 buku	100%	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100%	
4.03.4.03.01.21.37	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja yang akan diverifikasi	29 dokumen OPD	46 dokumen SKPD	29 dokumen OPD	29 dokumen OPD	100%	0 dokumen OPD	0 dokumen OPD	29 dokumen OPD	100%	
4.03.4.03.01.21.39	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Sejuta Bunga	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi Magelang Kota Sejuta Bunga	-	50 buku	50 buku	50 buku	100%	-	-	-	-	
4.03.4.03.01.21.42	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi RKPD	4 kegiatan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	4 laporan	100%	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 44	Konsultasi Publik RPJMD	Terlaksananya konsultasi publik RPJMD	-	3 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 46	Forum SKPD dan FGD RPJMD	Jumlah peserta yang mengikuti Forum SKPD dan FGD RPJMD	-	200 peserta	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 47	Pelaksanaan verifikasi renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra yang akan diverifikasi	-	46 dokumen SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 48	Penyusunan Indikator Kinerja RPJMD	Tersedianya dokumen indikator kinerja daerah RPJM Kota Magelang	-	50 buku	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 49	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis	Tersedianya dokumen KLHS RPJMD sebagai sarana untuk arahan terhadap kebijakan rencana program dalam raperda	-	20 buku	-	-	-	-	-	-	-	-
4.03.4.03.01.21.63	Kegiatan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Terevaluasi RPJP Kota Magelang 2005-2025	1 jenis dokumen	-	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	100%	-	-	-	-	-
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 54	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	-	1 jenis dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya dokumen renja Bappeda tahun 2017 dan perubahan renja 2016	2 jenis dokumen	2 jenis dokumen	-	-	-	-	-	-	-	pada tahun 2017 kegiatan ini masuk ke dalam program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 60	Sosialisasi RPJMD Kota Magelang	Jumlah peserta sosialisasi RPJMD	-	200 orang	-	-	-	-	-	-	-	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 61	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Air Minum Daerah	Jumlah dokumen Jakstrada	-	10 buku	-	-	-	-	-	-	-	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 62	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Gunung Tidar	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kawasan gunung tidar	-	35 buku	-	-	-	-	-	-	-	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 63	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Jumlah dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-	-	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
4.03.4.03.01.21.64	Penyusunan Standar satuan harga	dokumen standar satuan harga	300 buku	300 buku	300 buku	300 buku	100%	0 buku standarisasi biaya, 0 buku standarisasi harga	0 buku standarisasi biaya, 0 buku standarisasi harga	200 buku standarisasi biaya, 200 buku standarisasi harga	100%	
4.03.4.03.01.21.66	Monev Program Smart City	dokumen Program Smart City	50 buku	50 buku	50 buku	50 buku	100%	0 buku	0 buku	50 buku	100%	
4.03.4.03.01.21.69	Mapping efektifitas Kinerja Kegiatan terhadap Pencapaian Indikator Program		-	-	-	-	-	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100%	
4.03.4.03.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	100%	100%	100%	100%	40%	37.50%	100%	100%	
1.06 . 1.06.01 . 01 .22 . 04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah koordinasi bidang ekonomi	-	7 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	Mulai tahun 2017 pada Rentra OPD kegiatan ini di gabung dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan menjadi Kegiatan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
4.03.4.03.01.22.47	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang ekonomi dan prasarana wilayah	20 buku (1 kegiatan)	-	20 buku	20 buku	100%	10 buku	10 buku	20 buku	100%	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan hasil monev dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang ekonomi	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	Mulai tahun 2017 pada Renstra OPD kegiatan ini di gabung dengan kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi menjadi Kegiatan koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
4.03.4.03.01.22.41	Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan rumah potong hewan (RPH) ber-NKV	dokumen perencanaan pengembangan rumah potong hewan (RPH) ber-NKV	32 buku	-	32 buku	32 buku	100%	-	-	-	-	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 34	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Urban Farming	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan urban farming	35 dokumen	35 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 35	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Florikultura	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan florikultura	35 dokumen	35 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
4.03.4.03.01.22.40	Penyusunan dokumen pengembangan pertanian organik	dokumen pengembangan pertanian organik	32 buku	-	35 buku	35 buku	100%	-	-	-	-	
4.03.4.03.01.22.45	Penyusunan dokumen pemetaan potensi ekonomi Kota Magelang	dokumen pemetaan potensi ekonomi Kota Magelang	30 buku	-	35 buku	35 buku	100%	-	-	-	-	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 46	Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan jangkauan pemasaran dalam skema E-commerce	dokumen perencanaan pengembangan jangkauan pemasaran dalam skema E-commerce	35 buku	-	35 buku	35 buku	100%	-	-	-	-	
4.03.4.03.01.22.44	identifikasi Produk Unggulan daerah	dokumen pemetaan potensi ekonomi Kota Magelang	-	-	-	-	-	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100%	
4.03.4.03.01.22.48	Penyusunan dokumen perencanaan pemasaran produk dan jaringan kemitraan	dokumen perencanaan pemasaran produk dan jaringan kemitraan	-	-	-	-	-	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100%	
4.03.4.03.01.22.51	Penyusunan dokumen peninjauan kembali Rencana Induk Kota sejuta Bunga	dokumen peninjauan kembali Rencana Induk Kota sejuta Bunga	-	-	-	-	-	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100%	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
4.03.4.03.01.22.52	Penyusunan dokumen Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar	dokumen Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar	-	-	-	-	-	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	Kegiatan ini akan dipending pelaksanaan (di usulkan di drop pada Perubahan Anggaran 2018) dan diusulkan untuk di laksanakan pada Tahun Anggaran 2019
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100%	100%	100%	100%	100%	50%	53.13%	100%	100%	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Frekuensi koordinasi bidang sosial budaya	-	12 kali	-	-	-	-	-	-	-	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan hasil Monev dan pelaporan bidang sosial budaya	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	
4.03.4.03.01.23.09	Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	Tersedianya laporan penanggulangan kemiskinan	36 buku	36 buku	30 buku	30 buku	100%	2 laporan	2 laporan	4 laporan	100%	
4.03.4.03.01.23.13	Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak	tersedianya dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak tahun 2018-2023	-	-	-	-	-	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100%	
4.03.4.03.01.23.19	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Buku laporan hasil monev pendidikan untuk semua	40 buku	50 buku	50 buku	50 buku	100%	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen (Laporan PUS dan EDI)	100%	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
1.06 . 1.06.01 . 23 . 24	Perencanaan Pengembangan Olah Raga	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan keolahragaan Kota Magelang	-	30 buku	-	-	-	-	-	-	-	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	Laporan kegiatan koordinasi dan pembinaan penanganan GAKY	4 laporan	4 laporan	25 buku	25 buku	100%	1 laporan 2 kegiatan	1 laporan 2 kegiatan	2 laporan 4 kegiatan	100%	
4.03.4.03.01.23.30	Penyusunan masterplan pengembangan kesenian dan kebudayaan	dokumen Penyusunan masterplan pengembangan kesenian dan kebudayaan	30 buku	-	30 buku	30 buku	100%	-	-	-	-	
4.03.4.03.01.23.32	Penyusunan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi	dokumen rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi	30 buku	-	30 buku	30 buku	100%	-	-	-	-	
4.03.4.03.01.23.35	Penyusunan dokumen Perencanaan (RAD-HAM)	dokumen dokumen Rencana Aksi Hak Asasi Manusia	-	-	-	-	-	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100%	
4.03.4.03.01.23.37	Penyusunan Rencana aksi Daerah Pengarustamaan Gender	dokumen rencana aksi daerah pengarustamaan gender	25 buku	-	25 buku	25 buku	100%	-	-	-	-	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 36	Penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah	Penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah	20 buku	25 buku	-	-	-	-	-	-	-	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
4.03.4.03.01.23.38	Koordinasi, monitoring dan Evaluasi	Laporan Koordinasi, monitoring dan Evaluasi bidang sosial budaya	20 dokumen	-	20 dokumen	20 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	100%	
4.03.4.03.01.23.41	Penyusunan Dokumen Masterplan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	dokumen Masterplan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100%	
4.03.4.03.01.23.42	Penyusunan Dokumen Masterplan Rencana Induk Pariwisata Kota	dokumen Masterplan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100%	
1.08 . 1.06.01 . 01 . 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)											
1.08 . 1.06.01 . 01 . 24 . 06	Pemeliharaan RTH	Jumlah taman lingkungan kantor yang terawat dan terpelihara	-	1 paket	-	-	-	-	-	-	-	Mulai tahun 2017 kegiatan pemeliharaan RTH dengan outpur pemeliharaan taman kantor masuk di kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor
4.03.4.03.01.23.39	Kegiatan Penyusunan Dokumen Kemitraan	Laporan kegiatan penyusunan dokumen masterplan kemitraan	-	-	25 buku	25 buku	100%	-	-	-	-	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana		100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 01	Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	frekuensi koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	-	-	-	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 02	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Laporan hasil Monev dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 10	Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan dan Permukiman	Jumlah sistem informasi yang lingkungan permukiman yang terdata	-	3 kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 11	Penyusunan Dokumen Masterplan SmartCity	Jumlah dokumen smartcity	-	10 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 12	Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah	Tersedianya dokumen Rencana Investasi Jangka Menengah 2016-2021	-	10 buku	-	-	-	-	-	-	-	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
4.03.4.03.01.26.13	Penyusunan Blue print Unversal design	Tersedianya dokumen Blue print Unversal design	30 buku	-	20 buku	20 buku	100%	-	-	-	-	
					5 CD	5 CD						
4.03.4.03.01.26.14	Review strategi sanitasi kota	Dokumen Perencanaan EHRA dan SSK	1 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	-	-	
4.03.4.03.01.26.15	Kegiatan Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah	Dokumen visualisasi kawasan strategis dan prioritas	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-	-	
4.03.4.03.01.26.16	Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pemanfaatan Lahan dan Bangunan Eks Magelang Theatre	Dokumen rencana pemanfaatan lahan dan bangunan eks-Magelang Theater 2017	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-	-	
4.03.4.03.01.26.17	Kegiatan Pembaruan Data Dasar Usulan Keciaptakaryaan	Dokumen pembaruan data dasar usulan keciptakaryaan	25 buku		25 buku	25 buku	100%	-	-	-	-	
4.03.4.03.01.26.18	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Dampak Lingkungan TPST 3R Induk Magelang	Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan dampak lingkungan TPST 3R Induk Kota Magelang	25 buku		25 buku	25 buku	100%	-	-	-	-	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
4.03.4.03.01.26.19	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Bangunan TPST 3R Induk	Tersedianya dokumen perencanaan tata bangunan TPST 3R Induk	25 buku		25 buku	25 buku	100%	-	-	-	-	
4.03.4.03.01.26.20	Kegiatan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan TPST 3R Induk	Tersedianya dokumen penyusunan dokumen studi kelayakan TPST 3R Induk	25 buku		25 buku	25 buku	100%	-	-	-	-	
4.03.4.03.01.26.21	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)	dokumen Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)	-	-	-	-	-	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100%	
4.03.4.03.01.26.22	Monitoring dan Evaluasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	Buku Monev Sanitasi Kota Mageang	-	-	-	-	-	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100%	
4.03.4.03.01.26.23	Monitoring dan Evaluasi Akses Universal 100-0-100	Monev Akses Universal 100-0-100	-	-	-	-	-	2 laporan	2 laporan	4 laporan	100%	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra OPD Tahun 2021 (akhir Periode Renstra OPD)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan OPD sampai dengan Tahun 2016 (Tahun Lalu/n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2017 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Realisasi Program / Kegiatan Renja OPD Tahun berjalan (n-1) (Triwulan 2 tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2018 (Tahun berjalan/n-1)		Ket
					Rencana	Realisasi	Tingkat Capaian (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12	13
4.03.4.03.01.26.24	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	Buku Monev Sinkronisasi Perencanaan dan Implementasi Kawasan Strategis	-	-	-	-	-	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100%	
4.03.4.03.01.26.25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Manajemen Persampahan	Dokumen Induk Pengelolaan Sampah Kota Magelang	-	-	-	-	-	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100%	
2.18.4.03.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah											
2.18.4.03.01.16.02	Kegiatan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tersedianya data dan penataan dokumen/arsip daerah	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	

Ket : *) : data sampai dengan triwulan II 2018

Sumber data : Laporan Monev Renaksi Triwulan II Bappeda Kota Magelang

TABEL 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018 *)	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja (<i>indikator sasaran dalam RPJMD</i>)	-	-	88%	90%	93%	95%	98%	100%	90.41%	43.37%	93.00%	95.00%	
2	Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan (<i>indikator sasaran dalam RPJMD</i>)	-	-	60%	60%	70%	80%	90%	100%	94.75%	55.00%	94.75%	95.00%	
3	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (<i>indikator sasaran dalam RPJMD</i>)	-	-	55%	60%	62%	65%	68%	70%	70.19%	70.19%	70.19%	71.00%	
4	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga (<i>indikator sasaran dalam RPJMD</i>)	-	-	51.72%	58.62%	65.52%	75.86%	82.76%	82.66%	58.62%	65.52%	65.52%	75.86%	
5	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif (<i>indikator tujuan di dalam Renstra OPD</i>)	-	-	47.50%	51.25%	57.50%	62.50%	70%	75%	58.18%	70.05%	75.00%	75.00%	
6	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan (<i>indikator tujuan di dalam Renstra OPD</i>)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	
7	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas (<i>indikator tujuan di dalam Renstra OPD</i>)			70%	70%	75%	75%	80%	80%	73.44%	73.44%	75.00%	75.00%	
8	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	37.50%	100.00%	100.00%	
9	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	
10	Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	-	-	65%	70%	75%	80%	85%	90%	70.22%	55.52%	75.00%	80.00%	

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018 *)	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	-	-	70%	72%	75%	80%	82%	85%	72.08%	76.00%	76.00%	80.00%	
12	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	-	-	30%	35%	40%	45%	50%	55%	36%	68.66%	68.66%	70.00%	
13	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	-	-	74%	76%	78%	80%	82%	85%	71.145%	80.00%	80.00%	80.00%	
14	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	53.13%	100.00%	100.00%	
15	Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	-	-	1	2	3	4	4	4	2	2	3	4	
16	Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	-	-	85%	90%	90%	90%	95%	95%	92%	42.86%	90.00%	90.00%	
17	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.00%	100.00%	100.00%	
18	Rasio aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan:	-	-											
	a. S1	-	-	53%	47%	39%	37%	34%	31%	52.63%	36.84%	40.54%	37%	
	b. S2	-	-	32%	34%	45%	50%	53%	55%	33.33%	44.74%	46.95%	50%	
	c. S3	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.00%	
19	Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran	-	-	85%	87%	90%	90%	92%	95%	91.89%	2.70%	90.00%	90.00%	
20	Cakupan seminar/workshop/ pelatihan yang diselenggara kan Bappeda	-	-	95%	95%	98%	98%	98%	100%	100%	0.00%	98.00%	98.00%	
21	cakupan peningkatan kapasitas aparatur perencana OPD	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Ket : *) : data sampai dengan triwulan II 2018

Sumber data : Laporan Monev Renaksi Triwulan II Bappeda Kota Magelang

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN

- 3.1** Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2** Tujuan dan Sasaran Bappeda
- 3.3** Renja Perubahan OPD Bappeda
- 3.4** Pendanaan OPD Bappeda
- 3.5** Program dan Kegiatan

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Kebijakan nasional terkait dengan perencanaan pembangunan terdapat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 pada tahun ini

Pemerintah daerah kabupaten/kota diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku 5 tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang. Dokumen perencanaan tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) disusun oleh OPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari RKPD.

Pengendalian atau evaluasi juga diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terhadap dokumen perencanaan yang telah dibuat. Evaluasi dilakukan terhadap keselarasan antar dokumen dan pencapaian sasaran pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan. Evaluasi keselarasan antar dokumen dapat dilihat dari konsistensi penuangan program kegiatan dalam pencapaian indikator. Pengukuran pencapaian sasaran diukur melalui indikator pencapaian sasaran dalam perwujudan visi misi.

Regulasi yang mengatur RKPD adalah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, mengamanatkan penyusunan RKPD Tahun 2018 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) Tahun 2018 dan APBD Perubahan Tahun 2018. Penyusunan RKPD didasarkan pada hasil evaluasi RKPD tahun 2017 dan evaluasi capaian sampai dengan triwulan 2 tahun 2018. Adanya Penyusunan Perubahan RKPD 2018, di ikuti dengan penyusunan Perubahan renja OPD yang merupakan bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan akhir Perubahan RKPD dan nantinya sebagai dasar bagi OPD dalam penyusunan RKA Perubahan OPD. Pengendalian atau evaluasi juga diamanatkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 terhadap dokumen perencanaan yang telah dibuat. Evaluasi dilakukan terhadap keselarasan antar dokumen dan pencapaian sasaran pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan. Evaluasi keselarasan antar dokumen dapat dilihat dari konsistensi penuangan program kegiatan dalam pencapaian indikator. Pengukuran pencapaian sasaran diukur melalui indikator pencapaian sasaran dalam perwujudan visi misi.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pelaksanaan tupoksi setiap OPD tidak dapat dipisahkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional dan provinsi. Pembangunan nasional yang dilaksanakan adalah bersifat komprehensif dan sinergis, yaitu memiliki arti bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Sejalan dengan implementasi otonomi daerah maka setiap pemerintah daerah merupakan ujung tombak pembangunan nasional.

Semua urusan yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah dibagi habis dalam setiap OPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Isu-isu strategis yang merupakan fenomena nyata yang wajib dicermati dan diidentifikasi dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan Renstra Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah maka untuk kesinambungan dan keselarasan dengan kebijakan nasional maupun provinsi, benang merah yang dapat ditarik adalah upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada.

Adapun identifikasi isu-isu strategis yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana yang terdapat di dalam Renstra OPD dapat dilihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Magelang

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
		INTERNAL (Kewenangan OPD)	EKSTERNAL (Di luar Kewenangan OPD)	
Gambaran Pelayanan SKPD	Terdapat beberapa aspek manajerial yang harus ditindaklanjuti	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja, Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada serta dengan pendekatan yang lebih inovatif dan dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi; 2. Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dibidang perencanaan, masih perlu ada upaya peningkatan secara terus menerus; 3. Belum optimalnya implementasi hasil dokumen hasil perencanaan-an bidang; 4. Masih lemahnya manajemen pengaturan pekerjaan; 5. Masih kurangnya koordinasi antar bidang dengan PD; 6. Belum optimal dan meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 7. Belum optimalnya koordinasi internal dan antar bidang; 8. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang; 9. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi; 10. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
Kajian terhadap Visi Misi Kepala Daerah Terpilih	Masih adanya koordinasi, perencanaan dan movev bidang Perencanaan, Ekonomi Praswil dan Pemsosbud yang perlu disusun, di implmentasikan dan dan monitoring implmentasinya secara intensif	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja, Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	
Kajian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2013-2018	Capaian Bappeda Kota Magelang telah mendukung sasaran Renstra Bappeda provinsi	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja, Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	
Kajian Renstra Bappenas 2014-2019	Capaian Bappeda Kota Magelang telah mendukung sasaran Renstra Bappeda provinsi	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja, Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	
Kajian terhadap RTRW Kota Magelang		Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja, Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	
Kajian terhadap KLHS		Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja, Sarana prasarana yang memadai		

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
		INTERNAL (Kewenangan OPD)	EKSTERNAL (Di luar Kewenangan OPD)	
				11. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi; 12. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang (terkait dengan SOP) 13. Tidak seimbangnya beban kerja dengan kapasitas SDM 14. Belum optimalnya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan

Kebijakan Nasional sebagaimana terdapat di dalam RKP Tahun 2018, tema pembangunan yang diusung adalah **Memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan**. Untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana tema tersebut maka pendekatan pembangunan yang dilakukan adalah pendekatan holistic, tematik, integratif dan spasial.

Sedangkan dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah, tema pembangunan pada tahun 2018 adalah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berdikari. Tema dimaksudkan untuk mencapai Visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari Mboten Korupsi Mboten Ngapusi.

Dengan pendekatan yang sama tema pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2018 adalah **Kreatif dan Inovatif Bersama Mitra** Tema ini sebagai dasar perencanaan pembangunan yang disusun tahun 2017 untuk diimplementasikan melalui RKPD tahun 2018. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya penyusunan rencana aksi kemitraan antar pelaku pembangunan menyiapkan Kota Magelang sebagai kota Jasa Modern dan Cerdas. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan kreativitas dan inovasi yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya. Pada tahun 2017-2018 ini diasumsikan:

- a. Sudah terbentuk tata kelola organisasi pemerintahan dan manajemen kepegawaian sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Sudah terbentuk rencana aksi kemitraan.

**Tabel 3.2 Keterkaitan antar tema Pembangunan dalam RKP, RKP
Provinsi Jawa Tengah dan RKP Kota Magelang Tahun 2018**

Tema RKP Tahun 2018	Tema RKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018	Tema RKP Kota Magelang Tahun 2018	Benang Merah keterkaitan
Memacu Investasi Dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Dan Pemerataan	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berdikari	Kreatif dan Inovatif bersama Mitra	Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya penyusunan rencana aksi kemitraan antar pelaku pembangunan menyiapkan Kota Magelang sebagai kota Jasa Modern dan Cerdas. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan kreativitas dan inovasi yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya dengan memberi daya dorong pada perwujudan tema pembangunan provinsi Jawa Tengah maupun pada RKP Tahun 2018

Sumber : Perubahan RKP Pemerintah Kota Magelang tahun 2018

Kebijakan Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2018, meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-61 %;
2. Laju inflasi sebesar 3,5±1%;
3. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217 ribu;
4. Indeks Gini sebesar 0,38;
5. Tingkat kemiskinan sebesar 9,0 – 10,0 %;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,38%;
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,3 – 5,5%.

Secara lebih spesifik **dalam RKP Tahun 2018, tema** yang diusung adalah Memacu Investasi Dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Dan Pemerataan. Untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana tema tersebut maka pendekatan pembangunan yang dilakukan adalah pendekatan holistic, tematik, integratif dan spasial.

Prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan manusia dan masyarakat yang diprioritaskan pada Revolusi Mental, pembangunan kesehatan, Pendidikan, Perumahan dan Permukiman
- 2) Pembangunan Sektor unggulan diprioritaskan pada pembangunan kedaulatan pangan, pembangunan kemaritiman dan kelautan, pembangunan kedaulatan energy, pembangunan pariwisata, percepatan pertumbuhan industry dan kawasan ekonomi (KEK)

- 3) Pemerataan dan kewilayahan meliputi pemerataan antar kelompok pendapatan, reformasi agrarian, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, pembangunan konktivitas nasional
- 4) Pembangunan politik hukum pertahanan dan keamanan diprioritaskan pada : reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum, Stabilitas keamanan dan ketertiban, Konsolidasi demokrasi dan Efektifitas Demokrasi, Reformasi Birokrasi
- 5) Pembangunan Ekonomi diprioritaskan pada Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, peningkatan ekspor non migas, Reformasi Fiskal

Selain itu dalam RKP Tahun 2018 juga diprioritaskan **pembangunan bidang** yang meliputi :

1. Pengarusutamaan dan pembangunan Lintas Bidang meliputi : Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan Tata Kelola pemerintahan yang baik, Pengarusutamaan Gender, Pengarusutamaan AntiNarkoba, Pembangunan Lintas Bidang Perubahan Iklim.
2. Bidang Pembangunan Sosisl Budaya dan Kehidupan Beragama meliputi : Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pembangunan kesehatan, Pendidikan, Perpustakaan, Pemuda dan Olahraga, Agama, Kebudayaan, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak,
3. Bidang pembangunan Ekonomi : meliputi Stabilitas Harga, Usaha MIkro Kecil menengah dan Koperasi, Perdagangan Dalam negeri, Kerjasama Ekonomi Nasional, Jasa Keuangan, Badan Usaha Milik Negara, Data dan informasi statistic, Ketenagakerjaan.
4. Bidang Iptek meliputi : Peningkatan Ikapasitas Iptek, NSPK Pembangunan Iptek, Kerangka Regulasi,
5. Bidang Pembangunan Bidang Politik
6. Bidang aparatur : Aparatur Negara,
7. Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang
8. Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana
9. Bidang Sumber daya alam dan Lingkungan Hidup

Tahun 2018 yang merupakan tahun keempat RPJMD, menjadi tahun yang strategis untuk melihat ketercapaian pembangunan daerah jangka menengah Jawa Tengah. Memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, dengan berbagai permasalahan dan isu strategis, maka upaya pencapaian target pembangunan daerah tahun 2018 dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk **“Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berdikari”**, dengan prioritas meliputi :

1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan
2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin;

3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar;
4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana;
6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Arah kebijakan pembangunan Kota Magelang tahun 2018 ini untuk menjawab pencapaian prioritas pembangunan fokus pada:

- 1) Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya
- 2) Penataan organisai perangkat daerah (SOTK) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur
- 3) Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat
- 4) Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi
- 5) Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi tehnologi informasi
- 6) Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
- 7) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola aset;
- 8) Meningkatkan akses informasi, komunikasi, pertisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota
- 9) Peningkatan kemitraan pemerintah - Swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang PAUD, Dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah
- 10) Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat
- 11) Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan
- 12) Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan
- 13) Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan
- 14) Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan

- 15) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.
- 16) Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender
- 17) Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipasi resiko bencana konflik SARA, sosial, ekonomi, dan politik

Hubungan antara fokus prioritas dengan arah kebijakan dapat disampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3 Keterkaitan antara isu strategis dengan Arah Kebijakan Tahun 2018

FOKUS PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kemitraan pemerintah - swasta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelayanan pendidikan yang paud, dasar, non formal, dan perpustakaan daerah/wilayah ▪ Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat ▪ Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan ▪ Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan pmks, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengarusutamaan gender ▪ Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan
Kesiapan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya ▪ Penataan organisai perangkat daerah (sotk) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur ▪ Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah ▪ Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset dan profesionalitas aparatur pengelola aset;

FOKUS PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk kesiapan daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan akses informasi, komunikasi, partisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota ▪ Peningkatan sarana prasarana pelayanan perdagangan yang maju, inklusif dan berwawasan lingkungan ▪ Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang kum, industri, perdagangan, pertanian, peternakan. ▪ Penguatan model kemitraan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban lingkungan mengantisipasi resiko bencana konflik sara, sosial, ekonomi, dan politik ▪ Pengembangan pola sinergitas kebijakan dan program pembangunan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan pemukiman, pemberdayaan masyarakat, persampahan, penanggulangan bencana untuk menghasilkan lingkungan sehat, aman, berkelanjutan
Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat ▪ Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi ▪ Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi teknologi informasi

Sumber : Perubahan RKPD Pemerintah Kota Magelang tahun 2018

Jika dikaitkan dengan isu strategis, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2018 ini akan mampu menjawab isu strategis dengan keterkaitan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4 Konsistensi Fokus Prioritas dalam Menjawabn Isu Strategis

FOKUS PRIORITAS	ISU STRATEGIS DALAM RPJMD 2016-2021
Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar ▪ Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi)
Kesiapan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan reformasi birokrasi

FOKUS PRIORITAS	ISU STRATEGIS DALAM RPJMD 2016-2021
<p>Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk kesiapan daya saing daerah</p> <p>Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh dan mandiri ▪ Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ▪ Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal ▪ Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah

Sumber : Perubahan RKPD Pemerintah Kota Magelang tahun 2018

Menilik dari prioritas dan kebijakan pusat dan propinsi maka untuk Kota Magelang, Prioritas urusan yang mendukung arah kebijakan perencanaan tahun 2018 adalah: 1). Fungsi penunjang urusan pemerintahan; 2). Urusan pendidikan; 3). Urusan kesehatan; 4). Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; 5). Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 6). Urusan sosial; 7). Urusan komunikasi dan informatika; 8). Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah; 9). Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah; 10). Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; 11). Urusan perdagangan; 12). Urusan perpustakaan; 13). Urusan perindustrian; 14). Urusan pariwisata; 15). Urusan pertanian; 16). Urusan perikanan dan kelautan

Program unggulan sebagai prioritas pada perencanaan tahun 2018 adalah:

- 1) Program peningkatan kualitas sumber daya pemerintah;
- 2) Program peningkatan daya saing daerah;
- 3) Program kota cerdas;
- 4) Program pemerintahan responsif dan partisipatif;
- 5) Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan;
- 6) Program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan;
- 7) Program kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat madani dan media masa dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan.

Selain berpedomanan pada tema pembangunan Tahun 2018 yang merupakan tema pentahapan pencapaian Visi Walikota Magelang, Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Walikota Magelang, maka dalam rumusan tujuan dan sasaran akan menjadi landasan penyusunan arsitektur kinerja Bappeda dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Penetapan tujuan dan sasaran Renja OPD dilakukan dengan mengacu tujuan dan sasaran pada Renstra Bappeda 2016-2021.

Tujuan yang ingin dicapai dalam Perubahan Renja 2018 sebagaimana tujuan yang terdapat dalam Renstra BAPPEDA Kota Magelang tahun 2016-2021 antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan.
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung core business perencanaan
- c. Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku
- d. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- e. Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan
- f. Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang perencanaan, bidang ekonomi dan prasarana wilayah, dan bidang pemerintahan dan sosial budaya yang berkualitas
- g. Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
- h. Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah

Guna mewujudkan tujuan jangka menengah di atas, maka sasaran-sasaran yang hendak dituju BAPPEDA Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran untuk mewujudkan *tujuan pertama*, Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan adalah Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan
- b. Sasaran untuk mewujudkan tujuan kedua Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung core business perencanaan adalah Tersedianya sarpras yang berkualitas
- c. Sasaran untuk mewujudkan *tujuan ketiga*, Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku adalah Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku .
- d. Untuk mewujudkan *tujuan keempat*, Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan sasaran :

- 1) Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif
 - 2) Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate
 - 3) Terintegrasinya sistem informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan
- e. Untuk mewujudkan *tujuan ke lima*, Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan dengan sasaran Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan
- f. Untuk mewujudkan *tujuan ke enam*, Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas dengan sasaran :
- 1) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas.
 - 2) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas
 - 3) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya yang berkualitas
- g. Untuk mewujudkan *tujuan ke tujuh*, Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Perencanaan
 - 2) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
 - 3) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
- h. Untuk mewujudkan *tujuan ke delapan*, Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan sasaran :
- 1) Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD dan RPJM
 - 2) Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
 - 3) Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial Budaya

Berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021, Indikator kinerja pada Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang berikut indikator kerjanya sebagaimana tersaji dalam tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5
Indikator Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Presentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Renja	85%	88%	90%	93%	95%	98%	100%	100%
2	Prosentase Publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	60%	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
3	Presentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam APBD	52%	55%	60%	62%	65%	68%	70%	70%
4	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	44.83%	51.72%	58.62%	65.52%	75.86%	82.76%	89.66%	89.66%

Tujuan dari penyusunan rencana kerja Bappeda adalah untuk menyelaraskan program kegiatan pada tahun 2019 sesuai dengan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dalam Renstra OPD dengan mengacu pada dokumen perencanaan tingkat kota serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 terhadap target capaian indikator dan penyeselarasan terhadap kebijakan dan aturan yang berkembang.

Sasaran dari penyusunan renja ini antara lain:

- a. Menyeselaraskan program kegiatan sesuai dengan target capaian Sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2018;
- b. Menyeselaraskan program kegiatan sesuai dengan target capaian program kegiatan pada tahun 2018;
- c. Menyeselaraskan program kegiatan dengan kebijakan pusat dan provinsi yang belum tertampung dalam perencanaan awal;
- d. Menyeselaraskan program kegiatan dengan kebijakan daerah yang ada, dan;
- e. Menyeselaraskan program kegiatan dengan kemampuan keuangan daerah.

3.3 Rencana Kerja OPD (Perubahan Renja OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Program dan kegiatan sebagaimana analisis kebutuhan program dan kegiatan merupakan hasil analisis atas kebijakan-kebijakan pusat, provinsi dan daerah terkait fungsi penunjang perencanaan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Kota Magelang.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen APBD sampai dengan semester 1 Tahun 2018 Kota Magelang dan capaian indikator kinerja pada tahun 2018 sebagai dasar dalam penyusunan program kegiatan dalam penyusunan Renja OPD. Hasil evaluasi tersebut akan menunjukkan program kegiatan mana yang perlu didorong untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD maupun RKPD. Selain itu, perkembangan kondisi keuangan dan kebijakan akan mendorong adanya penyeselarasan beberapa program kegiatan untuk ditambahkan dalam dokumen perubahan renja.

Pada Perubahan Renja 2018 Bappeda Kota Magelang melaksanakan **11 program**. Dari sebelas program di atas akan di rinci dan di *breakdown* di dalam **67 kegiatan** yang di usulkan ke dalam Perubahan Renja Tahun 2018. Adapun Rincian Program dan kegiatan yang di usulkan ke dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Jumlah Progam dan Kegiatan yang di usulkan
Di dalam Renja Badan Perencanaan Kota Magelang Perubahan Tahun 2018**

NO	KODE	URUSAN /PROGRAM KERJA	Jumlah kegiatan di dalam Perubahan RENJA 2018
1	2	3	4
	4.3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan	
	4.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14 kegiatan
	4.3.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	9 kegiatan
	4.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5 kegiatan
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi	1 kegiatan
	2.18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan	
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1 kegiatan
	4.3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan	
	4.3.16	Program Kerjasama Pembangunan	1 kegiatan
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah	15 kegiatan
	4.3.22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	5 kegiatan
	4.3.23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	8 kegiatan
	4.3.26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	6 kegiatan
	4.3.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	2 kegiatan

3.4 Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Pendanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Magelang bersumber Dana Alokasi Umum (DAU). Secara keseluruhan di dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 terdapat 11 Program dan 67 kegiatan dengan

pagu Total anggaran Belanja Langsung pada Perubahan Renja Tahun 2018 sebesar Rp.6.482.224.000,-. Program kegiatan yang akan dilakukan oleh Bappeda Kota Magelang dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan tersebut secara lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7 Jumlah Program dan Kegiatan dan anggarannya yang di usulkan Di dalam Renja Badan Perencanaan Kota Magelang Perubahan Tahun 2018

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	Perubahan RENJA 2018
1	2	3	4
	4.3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan	
	4.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	783.272,000
1	4.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	719,000
2	4.3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	106,432,000
3	4.3.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7,710,000
4	4.3.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	143,000,000
5	4.3.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	72,794,000
6	4.3.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	17,081,000
7	4.3.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21,586,000
8	4.3.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,250,000
9	4.3.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7,056,000
10	4.3.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	14,981,000
11	4.3.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	30,710,000
12	4.3.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	262,840,000
13	4.3.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	88,661,000
14	4.3.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.452.000
	4.3.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.014.011,000
15	4.3.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	393.270,000
16	4.3.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	187.720,000
17	4.3.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	11.676,000
18	4.3.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	70.900,000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	Perubahan RENJA 2018
1	2	3	4
19	4.3.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5,500,000
20	4.3.2. 5	Pengadaan kendaraan dinas	261.800.000
21	4.3.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	32.260.000
22	4.3.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	45.200.000
23	4.3.2.10	Pengadaan meubelair	5.325.000
	4.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	58,691,000
24	4.3.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	16,485,000
25	4.3.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	8,500,000
26	4.3.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	11,550,000
27	4.3.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	17,510,000
28	4.3.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	4,646,000
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi	109.078,000
29	4.3.15.5	Penyusunan Profile Daerah	109.078,000
	2.18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan	
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	7.334,000
30	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	7.334,000
	4.3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan	
	4.3.16	Program Kerjasama Pembangunan	261.665,000
31	4.3.16.7	Fasilitasi FEDEP	261.665,000
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah	1,761,931,000
32	4.3.21.8	Penyusunan rancangan RKPd	303,263,000
33	4.3.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPd	133,400,000
34	4.3.21.10	Penetapan RKPd	34,855,000

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	Perubahan RENJA 2018
1	2	3	4
35	4.3.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	18,871,000
36	4.3.21.14	Forum OPD dan FGD	196,280,000
37	4.3.21.19	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	92,365,000
38	4.3.21.31	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	117,633,000
39	4.3.21.35	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	131,425,000
40	4.3.21.36	Penetapan Perubahan RKPD	29,330,000
41	4.3.21.37	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	117,229,000
42	4.3.21.42	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	75,000,000
43	4.3.21.64	Penyusunan Standar Satuan Harga	164,075,000
44	4.3.21.66	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	73.500,000
45	4.3.21.48	Penyusunan Indikator kinerja RPJMD	128.374,000
46	4.3.21.69	Mapping Efektifitas Kinerja Kegiatan terhadap pencapaian indikator Program	146.331.000
	4.3.22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	762,291,000
47	4.3.22.47	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	117,064,000
48	4.3.22.44	Identifikasi Produk Unggulan Daerah	163,850,000
49	4.3.22.51	Penyusunan Dokumen Peninjauan Kembali MKSB	214.077,000
50	4.3.22.47	Penyusunan dokumen perencanaan Pemasaran Produk dan Jaringan Kemitraan	160.700,000
51	4.3.22.48	RAD Pangan dan Gizi	106.600,000
	4.3.23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	828.090,000
52	4.3.23.13	RAD Kota Layak Anak	101.134,000
53	4.3.23.09	Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	162.575,000
54	4.3.23.19	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	104.000.000,-
55	4.3.23.25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	115.199,000
56	4.3.23.35	Penyusunan Rencana Aksi Daerah HAM	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	Perubahan RENJA 2018
1	2	3	4
			108.780,000
57	4.3.23.38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	29.733,000
58	4.3.23.41	Dokumen masterplan Pencegahan dan Penganggulan Bencana	101.334.000
59	4.3.23.50	Penyusunan Masterplan Rencana Induk Pariwisata	105.335,000
	4.3.26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	781,733,000
60	4.3.26.25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Manajemen Persampahan	233,690,000
61	4.3.26.15	Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah	98,832,000
62	4.3.26.21	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)	203,350,000
63	4.3.26.22	Monitoring dan Evaluasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	89,169,000
64	4.3.26.24	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	85,600,000
65	4.3.26.23	Moitoring dan Evaluasi Akses Universal 100-0-100	71,092,000
	4.3.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	114.128,000
66	4.3.20.15	Workshop perencanaan pembangunan daerah	73.248.000
67	4.3.20.16	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	40.880.000
		Jumlah	6.482.224.000

3.5 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan sebagaimana analisis kebutuhan program dan kegiatan yang disajikan pada bab sebelumnya merupakan hasil analisis atas kebijakan-kebijakan pusat, provinsi dan daerah terkait fungsi penunjang perencanaan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Kota Magelang.

Beberapa program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh peraturan tentang perencanaan pembangunan adalah penyusunan dokumen RKPD dari pelaksanaan musrenbang sampai dengan penyusunan perwal RKPD. Selain itu,

mulai tahun 2013 disusun Perubahan RKPD sebagai dasar penyusunan APBD Perubahan tahun berkenaan.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen APBD Tahun 2018 Kota Magelang dan capaian indikator kinerja pada tahun 2018 sebagai dasar dalam penyusunan program kegiatan dalam penyusunan Perubahan Renja OPD. Hasil evaluasi triwulan II tersebut akan menunjukkan program kegiatan mana yang perlu didorong untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD maupun RKPD. Selain itu, perkembangan kondisi keuangan dan kebijakan akan mendorong adanya penyesuaian beberapa program kegiatan untuk ditambahkan dalam dokumen perubahan renja.

Program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang merupakan program dan kegiatan yang masuk dalam ketiga kategori program prioritas sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD tahun 2018. Adapun ketentuan tentang ketiga program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program prioritas pertama merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2018 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau Program Unggulan Kepala Daerah, kesepakatan hasil musrenbang, hasil telaahan pokok pikiran dewan serta program intervensi yang bersifat nasional/provinsi dan hasil FGD.
- b. Program prioritas kedua merupakan program daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2018 sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD 2016-2021.
- c. Program prioritas ketiga merupakan prioritas program ditingkat OPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap OPD.

Program – program yang tercermin dan menjadi pertimbangan di dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2018 telah mempertimbangkan beberapa hal yang prioritas dan kebijakan nasional dan kebijakan daerah selain beberapa program kegiatan rutin yang dilaksanakan semua OPD dan menjadi pendukung pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal dan prioritas dan kebijakan yang menjadi landasan dalam penyusunan program kegiatan di dalam Perubahan Renja 2018, seperti : a). pencapaian visi misi kepala daerah, b). pencapaian SDGs, c). pengentasan kemiskinan, d). pendayagunaan potensi ekonomi daerah , dan kebijakan atau prioritas lainnya. Hal – hal tersebut di atas tercermin di dalam program dan kegiatan yang terdapat di dalam Perubahan Renja 2018. Konfigurasi program pada Perubahan Renja Bappeda Kota Magelang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Pengembangan Data/Informasi
3. Program Kerjasama Pembangunan
4. Program Perencanaan pembangunan bidang ekonomi
5. Program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

6. Program Perencanaan bidang fisik dan prasarana
7. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
8. Program Pelayanan administrasi perkantoran
9. Program peningkatan sarana prasarana perkantoran
10. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Secara keseluruhan di dalam Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 terdapat 11 Program dan 67 kegiatan dengan pagu Total Perubahan Renja Tahun 2019 untuk Belanja Langsung sebesar Rp.6.482.224.000,- .

Program kegiatan yang akan dilakukan oleh Bappeda Kota Magelang dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan tersebut secara lebih detail dapat dilihat pada tabel Perubahan Renja di bawah ini.

di EXCEL

MATRIKS
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2016-2021

OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 URUSAN : Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA	
				AWAL		PERUBAHAN		RENJA 2018	APBD 2018	RENJA P 2018		
				TOLOK UKUR	TARGET 2018	TOLOK UKUR	TARGET RENJA P 2018					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4.3	Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan										
	4.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						657,660,000	655,706,000	783,272,000		
1	4.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Bappeda Kota Magelang	tersedianya jasa surat menyurat	85 meterai, 10 paket pengiriman	tersedianya jasa surat menyurat	85 meterai, 10 paket pengiriman	719,000	719,000	719,000	Dana Alokasi Umum	
2	4.3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda Kota Magelang	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 rekening telp, 1 rekening listrik	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 rekening telepon, 1 rekening listrik, dan 1 penambahan daya	101,430,000	101,430,000	106,432,000	Dana Alokasi Umum	
3	4.3.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kota Magelang	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	27 unit kendaraan dinas	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	27 unit kendaraan dinas	7,710,000	7,710,000	7,710,000	Dana Alokasi Umum	
4	4.3.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bappeda Kota Magelang	Honorarium Pengelolaan keuangan daerah serta tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban bappeda	11 orang, 24 bendel	Honorarium Pengelolaan keuangan daerah serta tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban bappeda	11 orang, 24 bendel	129,500,000	134,750,000	143,000,000	Dana Alokasi Umum	
5	4.3.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bappeda Kota Magelang	terwujudnya kebersihan kantor	31 item peralatan kebersihan, 3 tenaga kebersihan	terwujudnya kebersihan kantor	31 item peralatan kebersihan, 3 tenaga kebersihan	62,208,000	64,396,000	72,794,000	Dana Alokasi Umum	
6	4.3.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda Kota Magelang	tersedianya alat tulis kantor	30 item	tersedianya alat tulis kantor	30 item	17,081,000	17,081,000	17,081,000	Dana Alokasi Umum	
7	4.3.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda Kota Magelang	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 item	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 item	36,586,000	21,586,000	21,586,000	Dana Alokasi Umum	
8	4.3.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bappeda Kota Magelang	tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	14 komponen	tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	14 komponen listrik	5,250,000	5,250,000	5,250,000	Dana Alokasi Umum	
9	4.3.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bappeda Kota Magelang	tersedianya bahan bacaan dan surat kabar	5 jenis	tersedianya bahan bacaan dan surat kabar	5 jenis	7,056,000	7,056,000	7,056,000	Dana Alokasi Umum	

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA
				AWAL		PERUBAHAN		RENJA 2018	APBD 2018	RENJA P 2018	
				TOLOK UKUR	TARGET 2018	TOLOK UKUR	TARGET RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	4.3.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Bappeda Kota Magelang	tersedianya bahan logistik kantor	18 kali isi ulang tabung gas, BBM genset	tersedianya bahan logistik kantor	18 kali pengisian ulang tabung gas, BBM genset	1,517,000	14,981,000	14,981,000	Dana Alokasi Umum
11	4.3.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda Kota Magelang	tersedianya makanan dan minuman	46 pegawai, 20 rapat, 150 tamu	tersedianya makanan dan minuman	49 pegawai, 36 rapat, 240 tamu	30,734,000	30,734,000	30,710,000	Dana Alokasi Umum
12	4.3.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bappeda Kota Magelang	terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	45 perjalanan dinas	terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	56 perjalanan dinas luar daerah	194,730,000	166,450,000	262,840,000	Dana Alokasi Umum
13	4.3.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Bappeda Kota Magelang	Tersedianya upah/honor tenaga kontrak	1 tenaga kontrak, 1 FO, 2 penjaga malam	Tersedianya upah/honor tenaga kontrak	1 orang tenaga kontrak, 1 Front Office, 2 Penjaga Malam	63,139,000	83,563,000	88,661,000	Dana Alokasi Umum
14	4.3.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Bappeda Kota Magelang	Tersedianya peralatan rumah tangga		Tersedianya peralatan rumah tangga	21 jenis peralatan rumah tangga			4,452,000	Dana Alokasi Umum
	4.3.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						1,300,194,000	315,386,000	1,014,011,000	
1	4.3.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Bappeda Kota Magelang	tersedianya perlengkapan gedung kantor	0	tersedianya perlengkapan gedung kantor	2 LED proyektor, 2 CCTV	579,800,000	0	32,620,000	Dana Alokasi Umum
2	4.3.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bappeda Kota Magelang	terpeliharanya gedung Bappeda	2 jenis pemeliharaan gedung kantor	terpeliharanya gedung Bappeda	4 jenis pemeliharaan gedung	251,120,000	34,670,000	393,270,000	Dana Alokasi Umum
3	4.3.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kota Magelang	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 unit mobil, 20 unit motor	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 unit mobil, 20 unit motor	206,320,000	192,640,000	187,720,000	Dana Alokasi Umum
4	4.3.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bappeda Kota Magelang	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	11 item	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	11 item	18,034,000	11,676,000	11,676,000	Dana Alokasi Umum
5	4.3.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bappeda Kota Magelang	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	14 item	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	14 item	74,620,000	70,900,000	70,900,000	Dana Alokasi Umum
6	4.3.2.27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Bappeda Kota Magelang	terpeliharanya mebeleur	4 item	terpeliharanya mebeleur	4 item	5,250,000	5,500,000	5,500,000	Dana Alokasi Umum
7	4.3.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Bappeda Kota Magelang	tersedianya peralatan gedung kantor	0	tersedianya peralatan gedung kantor	2 PC, 1 notebook, 6 printer	109,800,000	0	45,200,000	Dana Alokasi Umum

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA
				AWAL		PERUBAHAN		RENJA 2018	APBD 2018	RENJA P 2018	
				TOLOK UKUR	TARGET 2018	TOLOK UKUR	TARGET RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	4.3.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kota Magelang	tersedianya kendaraan dinas operasional	0	tersedianya kendaraan dinas operasional	1 unit mobil	55,250,000	0	261,800,000	Dana Alokasi Umum
9	4.3.2.10	Pengadaan mebeleur	Magelang	Tersedianya mebeleur		Tersedianya mebeleur	5 meja lipat			5,325,000	Dana Alokasi Umum
	4.3.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD						166,508,000	114,128,000	114,128,000	
1	4.3.5.7	Workshop perencanaan pembangunan daerah	Bappeda Kota Magelang dan Luar Kota Magelang	peserta workshop perencanaan pembangunan bagi pegawai Bappeda Kota Magelang yang mengikuti workshop	45 pegawai	peserta workshop perencanaan pembangunan bagi pegawai Bappeda Kota Magelang yang mengikuti workshop	45 orang	125,628,000	73,248,000	73,248,000	Dana Alokasi Umum
2	4.3.5.8	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Magelang	Tersosialisasikannya perencanaan pembangunan daerah	29 OPD	Tersosialisasikannya perencanaan pembangunan daerah	29 OPD	40,880,000	40,880,000	40,880,000	Dana Alokasi Umum
	4.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						64,251,000	55,051,000	58,691,000	
1	4.3.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Bappeda Kota Magelang	Dokumen Evaluasi Kegiatan Realisasi Keuangan dan Fisik bulanan	12 laporan	Dokumen Evaluasi Kegiatan Realisasi Keuangan dan Fisik bulanan	12 laporan	15,250,000	15,250,000	16,485,000	Dana Alokasi Umum
2	4.3.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Bappeda Kota Magelang	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	8,500,000	8,500,000	8,500,000	Dana Alokasi Umum
	4.3.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Bappeda Kota Magelang	Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 dokumen	Laporan Keuangan Akhir Tahun		9,200,000	0	0	Dana Alokasi Umum
3	4.3.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Kota Magelang	Dokumen Renja dan Renja Perubahan OPD	2 dokumen	Dokumen Renja dan Renja Perubahan OPD	2 dokumen	10,200,000	10,200,000	11,550,000	Dana Alokasi Umum
4	4.3.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Bappeda Kota Magelang	Dokumen RKA dan RKPA OPD	2 dokumen	Dokumen RKA dan RKPA OPD	2 dokumen	16,455,000	16,455,000	17,510,000	Dana Alokasi Umum
5	4.3.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Bappeda kota magelang	Dokumen LKJIP Bappeda	1 dokumen	Dokumen LKJIP Bappeda	1 dokumen	4,646,000	4,646,000	4,646,000	Dana Alokasi Umum
	4.3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan									
	4.3.15	Program Pengembangan data/informasi						59,078,000	59,078,000	109,078,000	
				Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan	90%	Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan					

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA
				AWAL		PERUBAHAN		RENJA 2018	APBD 2018	RENJA P 2018	
				TOLOK UKUR	TARGET 2018	TOLOK UKUR	TARGET RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date	70%	Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date					
1	4.3.15.5	Penyusunan Profile Daerah	Kota Magelang	Buku Profil / SIPD per Kecamatan	50 buku profil Kecamatan; 50 buku profil Kota	Buku Profil / SIPD per Kecamatan	50 buku profil kecamatan; 50 buku profil kota	59,078,000	59,078,000	109,078,000	Banprov & DAU
	2.18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan									
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah						12,264,000	12,264,000	7,334,000	
				Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	34%	Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku					
				Persentase arsip dan risalah	82%	Persentase arsip dan risalah					
				Persentase Penyelamatan Arsip	47%	Persentase Penyelamatan Arsip					
1	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Bappeda Kota Magelang	jumlah pendataan dan penataan arsip	1	jumlah pendataan dan penataan arsip	1 keg	12,264,000	12,264,000	7,334,000	Dana Alokasi Umum
	4.3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan									
	4.3.16	Program Kerjasama Pembangunan						150,000,000	200,000,000	261,665,000	
				Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	2	Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti					
1	4.3.16.7	Fasilitasi FEDEP	Bappeda Kota Magelang	tersedianya kegiatan pendukung fedep	(4 Rakoord, 2 Pameran, 4 Workshop, 2 FGD, 4 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan, 1 dokumen)	tersedianya kegiatan pendukung fedep	16 (4 Rakoord, 1 Pameran, 4 Workshop, 2 FGD, 4 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan, 1 dokumen)	150,000,000	200,000,000	261,665,000	Banprov & DAU
	4.3.21	Program perencanaan pembangunan daerah						2,010,235,000	1,593,735,000	1,761,931,000	
1	4.3.21.8	Penyusunan rancangan RKPd	Bappeda	Jumlah Dokumen Rancangan RKPd Kota Magelang	2 dokumen	Jumlah Dokumen Rancangan RKPd Kota Magelang	2 dokumen	288,696,000	303,263,000	303,263,000	Dana Alokasi Umum

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA
				AWAL		PERUBAHAN		RENJA 2018	APBD 2018	RENJA P 2018	
				TOLOK UKUR	TARGET 2018	TOLOK UKUR	TARGET RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	4.3.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKP	Bappeda Kota Magelang	Terlaksananya Musrenbang	2 kegiatan	Terlaksananya Musrenbang	2 kegiatan	141,200,000	133,400,000	133,400,000	Dana Alokasi Umum
3	4.3.21.10	Penetapan RKP	Bappeda Kota Magelang	Jumlah dokumen Perwal RKP	150 buku	Jumlah dokumen Perwal RKP	150 buku	34,855,000	34,855,000	34,855,000	Dana Alokasi Umum
4	4.3.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Bappeda	Jumlah dokumen money	4 laporan	Jumlah dokumen money	4 laporan	18,871,000	18,871,000	18,871,000	Dana Alokasi Umum
5	4.3.21.14	Forum OPD dan FGD	Bappeda	Jumlah forum SKPD	1 forum OPD, 9 FGD	Jumlah forum SKPD	1 Forum OPD 9 FGD	195,280,000	196,280,000	196,280,000	Dana Alokasi Umum
6	4.3.21.19	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Magelang	Jumlah media publikasi	4 media publikasi	Jumlah media publikasi	4 media publikasi	34,000,000	49,000,000	92,365,000	Dana Alokasi Umum
7	4.3.21.31	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	Bappeda	Jumlah Renja OPD yang diverifikasi	29 OPD	Jumlah Renja OPD yang diverifikasi	29 OPD	96,120,000	117,633,000	117,633,000	Dana Alokasi Umum
8	4.3.21.35	Penyusunan Rancangan Perubahan RKP	Bappeda	Dokumen ranc Perubahan RKP	1 dokumen	Dokumen ranc Perubahan RKP	1 dokumen	140,657,000	131,425,000	131,425,000	Dana Alokasi Umum
9	4.3.21.36	Penetapan Perubahan RKP	Bappeda	Jumlah dokumen perubahan RKP	1 dokumen	Jumlah dokumen perubahan RKP	1 dokumen	29,330,000	29,330,000	29,330,000	Dana Alokasi Umum
10	4.3.21.37	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	Bappeda	Jumlah perubahan renja OPD yang diverifikasi	29 OPD	Jumlah perubahan renja OPD yang diverifikasi	29 OPD	93,929,000	117,229,000	117,229,000	Dana Alokasi Umum
11	4.3.21.42	Pengendalian dan Evaluasi RKP	Bappeda Kota Magelang	Pengendalian dan Evaluasi RKP	4 laporan	Pengendalian dan Evaluasi RKP	4 laporan	48,125,000	48,124,000	75,000,000	Dana Alokasi Umum
12	4.3.21.64	Penyusunan Standar Satuan Harga	Kota Magelang	Buku Standarisasi Harga	200 buku Standarisasi Harga; 200 buku Standar Biaya	Buku Standarisasi Harga	200 buku Standarisasi Harga; 200 buku Standar Biaya	164,075,000	164,075,000	164,075,000	Dana Alokasi Umum
13	4.3.21.66	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	Kota Magelang	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Masterplan Smart City	4 Laporan	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Masterplan Smart City	50 buku	111,399,000	103,919,000	73,500,000	Dana Alokasi Umum
14	4.3.21.69	Mapping Efektifitas Kinerja Kegiatan terhadap Pencapaian Indikator Program	Kota Magelang	Terpetakannya efektifitas kinerja kegiatan pencapaian indikator program	1 dokumen	Terpetakannya efektifitas kinerja kegiatan pencapaian indikator program	1 dokumen	168,831,000	146,331,000	146,331,000	Dana Alokasi Umum
15	4.3.21.48	Penyusunan Indikator Kinerja RPJMD	Kota Magelang	Tersusunnya indikator kinerja RPJMD	29 OPD	Tersusunnya indikator kinerja RPJMD	1 dokumen	0	0	128,374,000	Dana Alokasi Umum

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA
				AWAL		PERUBAHAN		RENJA 2018	APBD 2018	RENJA P 2018	
				TOLOK UKUR	TARGET 2018	TOLOK UKUR	TARGET RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.3.22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi						678,200,000	891,948,000	762,291,000	
1	4.3.22.47	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Bappeda Kota Magelang	tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi dan prasarana wilayah	20 buku	tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi dan prasarana wilayah	20 buku	120,866,000	127,360,000	117,064,000	Dana Alokasi Umum
2	4.3.22.44	Identifikasi Produk Unggulan Daerah	Kota Magelang	Tersedianya dokumen identifikasi PUD	1 dokumen	Tersedianya dokumen identifikasi PUD	1 dokumen	170,000,000	163,850,000	163,850,000	Dana Alokasi Umum
3	4.3.22.51	Penyusunan Dokumen Peninjauan Kembali MKSB	Kota Magelang	tersedianya dokumen Peninjauan Kembali MKSB	1 dokumen	tersedianya dokumen Peninjauan Kembali MKSB	1 dokumen	0	214,077,000	214,077,000	Dana Alokasi Umum
	4.3.22.52	Penyusunan Dokumen Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar	Kota Magelang	tersedianya dokumen pengembangan Gunung Tidar sebagai kebun raya	1 dokumen	tersedianya dokumen pengembangan Gunung Tidar sebagai kebun raya	0	0	225,961,000	0	Dana Alokasi Umum
4	4.3.22.48	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemasaran Produk dan Jaringan Kemitraan	Kota Magelang	tersedianya dokumen Perencanaan Pemasaran Produk dan Jaringan Kemitraan	1 dokumen	tersedianya dokumen Perencanaan Pemasaran Produk dan Jaringan Kemitraan	1 dokumen	237,151,000	160,700,000	160,700,000	Dana Alokasi Umum
5	4.3.22.69	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	Kota Magelang	tersedianya dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi		tersedianya dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	1 dokumen	0	0	106,600,000	Dana Alokasi Umum
	4.3.23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya						1,429,313,500	686,475,000	828,090,000	
				Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi					
1	4.3.23.9	Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	Kota Magelang	Jumlah Laporan LP2KD	4 laporan	Jumlah Laporan LP2KD	4 laporan	110,690,000	110,960,000	162,575,000	Banprov & DAU
2	4.3.23.19	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Laporan Monev	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Monev	1 Dokumen	54,000,000	54,000,000	104,000,000	Banprov & DAU
3	4.3.23.25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	Kota Magelang	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan pembinaan Penanganan GAKY	2 Laporan 4 Kegiatan	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan pembinaan Penanganan GAKY	2 Laporan 4 Kegiatan	76,452,000	75,199,000	115,199,000	Banprov & DAU
4	4.3.23.38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Bappeda Kota Magelang	Laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang sosial dan budaya	4 Dokumen	Laporan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang sosial dan budaya	4 Dokumen	0	29,733,000	29,733,000	Dana Alokasi Umum
5	4.3.23.41	Penyusunan Dokumen Masterplan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perencanaan Masterplan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Masterplan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	0	101,334,000	101,334,000	Dana Alokasi Umum
6	4.3.23.42	Penyusun Dokumen Masterplan Rencana Induk Pariwisata Kota	Kota Magelang	Jumlah Dokumen RIPPARKOT (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RIPPARKOT (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota)	1 Dokumen	0	105,335,000	105,335,000	Dana Alokasi Umum
7	4.3.23.35	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perencanaan RAD HAM	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan RAD HAM	1 Dokumen	0	108,780,000	108,780,000	Dana Alokasi Umum

NO	KODE	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA
				AWAL		PERUBAHAN		RENJA 2018	APBD 2018	RENJA P 2018	
				TOLOK UKUR	TARGET 2018	TOLOK UKUR	TARGET RENJA P 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	4.3.23.47	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA) Tahun 2018-2021	Kota Magelang	Tersedia Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak tahun 2018-2021	1 Dokumen	Tersedia Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak tahun 2018-2021	1 Dokumen	108,134,000	101,134,000	101,134,000	Dana Alokasi Umum
	4.3.26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana						924,559,000	691,209,000	781,733,000	
				cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	100%	cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana					
1	4.3.26.25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Manajemen Persampahan	Kota Magelang	tersedianya dokumen manajemen persampahan	1 dokumen	tersedianya dokumen manajemen persampahan	1 dokumen	75,000,000	233,690,000	233,690,000	Dana Alokasi Umum
2	4.3.26.15	Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah	Kota Magelang	tersedianya Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah	1 dokumen	tersedianya Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah	1 dokumen	0	0	98,832,000	Dana Alokasi Umum
3	4.3.26.21	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)	Kota Magelang	tersedianya dokumen antisipasi dan proteksi dini terhadap kebakaran	1 dokumen	tersedianya dokumen antisipasi dan proteksi dini terhadap kebakaran	1 dokumen	0	203,350,000	203,350,000	Dana Alokasi Umum
4	4.3.26.22	Monitoring dan Evaluasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	Kota Magelang	Tersedianya informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di dokumen AMPL	1 dokumen	Tersedianya informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di dokumen AMPL	1 dokumen	90,000,000	89,169,000	89,169,000	Dana Alokasi Umum
5	4.3.26.24	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	Kota Magelang	Tersedianya dokumen monev capaian kawasan strategis		Tersedianya dokumen monev capaian kawasan strategis	1 dokumen		90,000,000	85,600,000	Dana Alokasi Umum
6	4.3.26.23	Moitoring dan Evaluasi Akses Universal 100-0-100	Kota Magelang	Tersedianya dokumen capaian terhadap program 100-0-00	1 dokumen	Tersedianya dokumen capaian terhadap program 100-0-00	1 dokumen	203,350,000	75,000,000	71,092,000	Dana Alokasi Umum
	4.3.26.39	Review Masterplan Kawasan GOR Samapta			30		30	89,169,000	0	0	Dana Alokasi Umum
						TOTAL		7,452,262,500	5,274,980,000	6,482,224,000	

50,000,000

100,000,000

50,000,000
50,000,000
40,000,000

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang selanjutnya menjadi dasar perumusan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018. Tujuan penyusunan Perubahan Renja OPD dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada anggaran Perubahan Tahun 2018 serta mengacu pada perencanaan tahun pertama Renstra OPD.

Sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, maka Renja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018 perlu dilakukan perubahan. Perubahan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian indikator RPJMD sampai dengan Semester I Tahun 2018 serta pencapaian indikator kinerja OPD. Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja OPD Tahun 2018 sangat terbatas, hanya pada Triwulan IV Tahun 2018, maka perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas untuk semua kegiatan baik kegiatan dalam penetapan maupun perubahan. Sehingga semua kegiatan dapat selesai dilaksanakan sesuai rencana serta memenuhi capaian indikator baik dalam RPJMD dan Renstra OPD.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018 merupakan penyesuaian terhadap hasil evaluasi capaian target indikator dan juga perkembangan kondisi hingga Triwulan II Tahun 2018 seperti kondisi keuangan dan kebijakan.

Rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2018 yang semula terdiri dari 11 (sebelas) program dan 60 (enam puluh) kegiatan menjadi 11 (sebelas) program dan 67 (enam puluh tujuh) kegiatan dengan pagu awal sebesar **Rp. 5.274.980.000,00** (Lima milyar dua ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi **Rp 6.482.224.000,-** (Enam milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Dokumen Perubahan rencana kerja Bappeda Kota Magelang Tahun 2018 ini digunakan sebagai acuan penyusunan Perubahan Rancangan Kerja Anggaran

(RKA), pelaksanaan program kegiatan tahun 2018, dan evaluasi program yang dilakukan.

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Renstra namun tidak tercantum dalam renja dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, adanya penyesuaian nama program dan kegiatan demi keselarasan indikator kinerja maupun perubahan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang muncul dalam Renja namun tidak terdapat dalam Renstra dimungkinkan dengan kriteria dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD, adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan serta capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan belum terpenuhi.

Dengan disusunnya Perubahan Renja OPD dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan Semester I. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG



Ir. JOKO SOEPARNO, MPL
Pembina Utama Muda
NIP. 19601212 198903 1 018